

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

Edisi 63/JANUARI-JUNI/2014

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

JEJAK KEBANGKITAN NASIONAL



Konferensi




ASIA - AFRIKA

7 Reel Arsip Film
1778 Lembar Arsip Kertas
565 Lembar Arsip Foto



Mari Dukung
Arsip Konferensi Asia Afrika
sebagai Memory of the World

Video KAA dapat disaksikan di www.anri.go.id atau

-  @ArsipNasionalRI
-  Arsip Nasional Republik Indonesia
-  Humas Arsip Nasional RI

DAFTAR ISI



5 **KEBANGKITAN NASIONAL MENGINSPIRASI JEJAK LANGKAH KEARSIPAN DI INDONESIA**

Bagi bangsa Indonesia, perjuangan bangsa tidak melulu melalui kedahsyatan senjata saja, namun perjuangan dalam bentuk pergerakan moral untuk mewujudkan persatuan bangsa merupakan titik balik perlawanan melawan penjajah. Pergerakan kecil diibaratkan sebagai kehidupan yang tumbuh menjadi pohon kesadaran yang menyebarkan benih-benih baru dan telah mengilhami rasa kebersamaan maupun rasa memiliki di antara para pribumi dan priyayi terhadap bangsa Indonesia.

DARI REDAKSI _____ **4**

Ina Mirawati : _____ **15**

**PEMBERANTASAN BUTA
HURUF: SEBUAH CATATAN
MENUJU SUKSESNYA
KEBANGKITAN NASIONAL**

Dharwis W.U. Yacob : _____ **18**

**TIRTO ADHI SOERJO: TOKOH
KEBANGKITAN NASIONAL DAN
PELOPOR POLITIK ARSIP**

Profil: _____ **23**

**SEPAK TERJANG TASDIK
KINANTO: REFORMASI
BIROKRASI DIMULAI DARI
INTERNAL**

Dhani Sugiharto : _____ **25**

**RESTORASI DIGITAL FILM
KONFERENSI ASIA AFRIKA**



9 **Khoerun Nisa Fadillah : ARSIP DAN KELANCARAN PEMILU**

Pemilu sebagai manifestasi kebangkitan demokrasi nasional sejatinya menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan memimpin bangsa dan negara ini dan melalui pemilu, rakyat dapat mencalonkan diri untuk duduk dalam jabatan legislatif maupun eksekutif.

Dwi Nurmaningsih : _____ **28**

**GUIDE ARSIP, MENDEKATKAN
ARSIP DENGAN PENGGUNA**

Satimin : _____ **31**

**AKUNTABILITAS DALAM
PUSNAHAN ARSIP**

Adhie Gesit Pambudi : _____ **34**

**ARCHIVAL MANAGEMENT
PLAN: TITIK BALIK
KEBANGKITAN PENGELOLAAN
ARSIP STATIS DI ANRI**

Yuanita Utami : _____ **38**

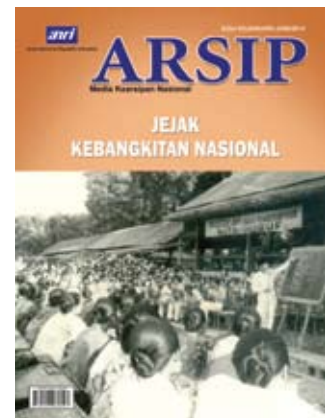
**TERBIT FAJAR DI UFUK TIMUR
JEPARA**

LIPUTAN _____ **41**



12 **Fauzan Anyasfika : ARSIP, "SENJATA" PERANG ASIMETRIS**

Pengelolaan arsip wilayah perbatasan yang baik, akan berdampak pada perlindungan dan penyelamatan kedaulatan teritorial NKRI. Di bagian inilah, arsip bukan hanya untuk kearsipan, melainkan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



KETERANGAN COVER

Presiden Soekarno sedang membantu mengajarkan masyarakat yang buta huruf di Yogya, 1946. ANRI, Foto IPPHOS No. 261

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Dra. Listianingtyas M.

Wakil Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hilman Rosmana,
M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,
Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si.,
Drs. Langgeng Sulistyio B,

Redaktur Pelaksana:

Gurandhyka, S. IP,
Neneng Ridayanti, S.S.,
Bambang Barlian, S.AP, Susanti, S.Sos., M.Hum.,
Eva Julianty, S.Kom.,
Adhie Gesit Pambudi, S.Sos., MA.

Sekretariat:

Sri Wahyuni, Ifta Wydyaningsih, A.Md,
Raistiwar Pratama, S.S

Reporter:

Ika Kartika, S.Ikom., Annawaty Betawinda M,
S.Sos., Tiara Kharisma, S.Ikom., Erieka Nurlidya,
S.Sos.,

Fotografer:

Hendri Erick Zulkarnaen, S.Kom, Supriyono,
Firmansyah, A.Md,

Editor:

Neneng Ridayanti, S.S.,
Eva Julianty, S.Kom,
Bambang Barlian, S.AP
Tiara Kharisma, S.I.Kom.

Perwajahan/Tata Letak:

Isanto, A.Md

Distributor:

Abdul Hamid, Farida Aryani, S.Sos
Achmad Sadari

.....
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id

Momentum Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908 menandai munculnya kesadaran kolektif di antara komponen bangsa yang mewakili berbagai kelompok dengan berbagai latar belakang, baik etnis maupun profesi, terbentuk dalam pergerakan secara nasional untuk mewujudkan kemerdekaan. Pergerakan ini menandakan suatu bentuk perjuangan yang lebih progresif dengan munculnya diplomasi sebagai salah satu bentuk perjuangan di samping model konfrontasi yang telah lebih dahulu ada.

Kini, semangat dan nilai-nilai kebangkitan nasional direvitalisasikan dalam upaya mengatasi berbagai persoalan bangsa dan menjawab tantangan pada berbagai aspek kehidupan. Perkembangan peradaban yang begitu pesat menuntut kesiapan untuk melakukan penyesuaian.

Majalah ARSIP untuk edisi kali ini mengangkat Kebangkitan Nasional sebagai tema utama, berisi berbagai artikel, wawancara dengan para narasumber tentang keterkaitan kebangkitan nasional dengan masalah kekinian, dan reportase serta hasil liputan lainnya.

Perlu kami informasikan, dikarenakan efisiensi anggaran, maka pada tahun ini Majalah ARSIP hanya akan terbit dua kali. Kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari pembaca guna memperbaiki kualitas majalah ini. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati sajian majalah edisi ini.

Redaksi

KEBANGKITAN NASIONAL MENGINSPIRASI JEJAK LANGKAH KEARSIPAN DI INDONESIA



Delapan tokoh Boedi Oetomo, di halaman Gedung *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) Sekolah Kedokteran untuk Bumiputera, 1908. Duduk dari kiri ke kanan: Goenawan Mangoenkoesoemo, Latumeten, Moh. Arsjad, Angka Prodjosuedirdjo. Berdiri dari kiri ke kanan: Moh. Saleh, Soesilo, Soetomo, Gumbrek

Bagi bangsa Indonesia, perjuangan bangsa tidak melulu melalui kedahsyatan senjata saja, namun perjuangan dalam bentuk pergerakan moral untuk mewujudkan persatuan bangsa merupakan titik balik perlawanan melawan penjajah. Pergerakan kecil diibaratkan sebagai kehidupan yang tumbuh menjadi pohon kesadaran yang menyebarkan benih-benih baru dan telah mengilhami rasa kebersamaan maupun rasa memiliki diantara para pribumi dan priyayi terhadap bangsa Indonesia,

Salah satu pergerakan yang kemudian menjadi inspirasi bagi perkumpulan lain adalah keprihatinan sekelompok priyayi yang bersekolah di Sekolah Dokter Jawa terhadap dunia pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda. Di mana sekolah tidak mendidik anak-anak pribumi Indonesia supaya menjadi orang yang berderajat tinggi, tidak untuk memelihara cita-cita kemanusiaan, untuk menjadi manusia dan bangsa yang sejajar dengan manusia dan bangsa di dunia lainnya. Sebaliknya, pendidikan hanya mendidik pribumi sebagai pelayan

yang patuh dan setia, menjadi alat dan kaki tangan penjajah, yang dapat bekerja hanya untuk kepentingan majikan semata-mata. Berawal dari keprihatinan ini maka mereka sepakat membentuk perkumpulan BOEDI OETOMO di gedung STOVIA (*School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen*)-tempat Sekolah Dokter Jawa yang telah ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Kedokteran.

Berdirinya BOEDI OETOMO 20 Mei 1908 yang kemudian oleh pemerintah, kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional disebut-

LAPORAN UTAMA

sebut sebagai 'embrio' dari sebuah organisasi modern yang menjiwai kebangkitan seluruh komponen bangsa untuk meneguhkan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut sejarawan Bonnie Triyana, meskipun masih ada diskusi panjang lebar mengenai apakah benar BOEDI OETOMO merupakan organisasi modern pertama yang mengawali tumbuhnya nasionalisme, namun harus diingat juga bahwa melihat sejarah bukan hanya siapa yang lebih dulu, melainkan siapa yang mendatangkan kegunaan bagi pembebasan nasional Indonesia, dengan demikian organisasi-organisasi lain seperti *Indische Partij*, Sarekat Islam, dan bahkan Partai Komunis Indonesia pun bisa dihitung sebagai organisasi yang menyumbangkan kekuatan bagi bangkitnya rasa nasionalisme Indonesia.

Bonnie Triyana yang aktif menulis sejarah pergerakan Indonesia di surat kabar ini selanjutnya menambahkan, tentunya banyak arsip yang menarik dan dijadikan bukti apabila dikaitkan dengan kebangkitan nasional, namun secara pribadi saya lebih menyukai catatan personal dari para aktivis gerakan nasionalisme Indonesia, bisa berupa surat atau artikel yang mereka tulis di media massa, karena sesungguhnya mencerminkan bagaimana pandangan para tokoh terhadap persoalan yang dihadapi bangsa pada masa lalu.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Drs. Mustari Irawan, MPA, bahwa apabila kita mundur kebelakang sebelum tahun 1908 sebenarnya sudah ada beberapa organisasi yang muncul sebelum BOEDI OETOMO. Dalam



Bonnie Triyana

“**Kebangkitan nasional harus dipahami dalam konteks zamannya sehingga makna yang tersirat dari ‘kebangkitan nasional’ harus memberi makna bagi kehidupan di zamannya**”

perspektif sejarah, kehadiran BOEDI OETOMO bukan sekedar terbentuknya perkumpulan orang sekolahan saja tetapi bagaimana perkumpulan priyayi Jawa sebagai kelompok intelektual pada masa itu berpikir bagaimana membangun Indonesia kedepannya, membangun kesadaran terhadap rasa nasionalisme, kesadaran terhadap kebangsaan yang harus dibangun

supaya mereka sadar tentang rasa nasionalismenya, tuturnya.

Terkait dengan khazanah arsip tentang peristiwa kebangkitan nasional antara tahun 1890 s.d. 1945, diakui oleh Kepala ANRI masih sedikit namun dalam *mail reporten* sudah ada. Sejauh ini yang ada adalah arsip-arsip tentang peringatan hari kebangkitan nasional bukan kepada saat bersamaan dengan peristiwa kebangkitan nasional itu sendiri. Sampai sekarang ANRI masih terus menelusuri arsip-arsip yang terkait langsung dengan peristiwa ataupun pergerakan yang mengilhami kebangkitan nasional, baik itu penelusuran kepada ahli waris para pendiri tokoh pergerakan nasional maupun saksi perorangan yang dekat dengan peristiwa tersebut. Sementara mengenai akses arsip terhadap peristiwa kebangkitan nasional, prinsipnya semua terbuka untuk publik

Bonnie Triyana yang juga pemimpin redaksi majalah *Historia* menambahkan, Kebangkitan nasional harus dipahami dalam konteks zamannya sehingga makna yang tersirat dari 'kebangkitan nasional' harus memberi makna bagi kehidupan di zamannya, bahwa kebangkitan nasional di zaman sekarang harus dipahami sebagai momentum untuk melakukan berbagai macam perubahan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Indonesia harus menjadi sebuah negara kesejahteraan yang mendatangkan kemakmuran dan memberikan jaminan terbaik bagi rakyatnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Kepala ANRI Mustari Irawan

“**esensi suatu kebangkitan itu adalah suatu perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik**”

Birokrasi, Tasdik Kinanto menjelaskan, bahwa perubahan untuk perbaikan kehidupan rakyat, salah satunya diemban juga oleh aparatur negara dengan cara mengambil peran dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi di setiap penyelenggaraan negara. Baginya, reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai kebangkitan, sebagai upaya untuk membangun bangsa melalui pembenahan birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakekatnya mengajak kita untuk melakukan hal yang lebih baik dalam hal tata kelola pemerintahan, perubahan yang terencana, sistemik dan melibatkan *stakeholder* terkait

serta dengan tujuan dan strategi yang jelas, yang harus dilakukan oleh semua elemen pemerintahan, baik di pusat dan daerah. Salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan birokrasi yang modern adalah undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), tutur pria yang memulai kariernya sebagai pegawai Sekretariat Negara yang diperbantukan pada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Selanjutnya, Tasdik Kinanto yang mengemban jabatan Sesmenpan sejak tahun 2007, dalam penjelasannya mengatakan bahwa

untuk mewujudkan *good governance* maka reformasi birokrasi menuntut adanya akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan negara. Oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan informasi melalui sistem kearsipan yang terpadu, terintegrasi, lengkap dan modern. Menurutnya, mengurus arsip merupakan tugas mulia, karena proses menata arsip yang baik juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Menjadi orang kearsipan harus bangga karena dia melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa, imbuh Tasdik Kinanto yang kariernya sebagai Sesmenpan sempat melayani tiga orang menteri : Taufik Effendi, EE. Mangindaan, dan Azwar Abubakar

Dalam suatu wawancara terpisah, Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA juga mengatakan bahwa esensi suatu kebangkitan itu adalah suatu perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, setiap perubahan yang dilakukan berharap lebih baik. Begitupun dalam bidang kearsipan, perubahan sesungguhnya sudah dimulai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Namun seiring dengan perubahan zaman maka dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Perubahan yang dimaksud tentunya kearah yang lebih baik, tutur kandidat doktor bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan terjadi perubahan yang sangat besar, kata Mustari Irawan yang sampai saat ini masih merangkap sebagai Deputi

LAPORAN UTAMA

bidang Konservasi ANRI. Perubahan yang dimaksud mulai dari konsep, terminologi arsip, maupun pengaturan arsip sejak proses penciptaan dan bagaimana memperlakukannya, termasuk hak akses arsip bagi masyarakat. Semuanya itu diharapkan bermuara bagi ANRI yang mengemban fungsi sebagai pembina penyelenggaraan kearsipan nasional, dimana diharapkan pengelolaan arsip dinamis mampu memperlihatkan kepentingan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi atau lembaga. Pada sisi lain, sempurnanya penyelenggaraan kearsipan statis sangat terkait dengan khazanah *memory collective* sebagai bagian dari *national heritage*.

Menurut Kepala ANRI, Undang-Undang Kearsipan ini cakupannya juga lebih luas, peran lembaga kearsipan memperlihatkan pembagian fungsi-fungsi yang sejalan dengan sistem pemerintahan kita yang menganut desentralisasi. Selain itu, tutur pria yang menekuni hobi menulis puisi ini, masalah kearsipan bukan semata-mata tanggung jawab lembaga atau pemerintah saja tetapi masyarakatpun ikut diberdayakan dalam pelibatannya untuk menyelamatkan arsip. Hal ini diikuti dengan adanya sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi siapapun yang lalai terhadap arsip, imbuhnya.

Lebih jauh Kepala ANRI dalam penjelasannya tentang strategi yang akan dilakukan ANRI sejalan dengan spirit kebangkitan bangsa di bidang kearsipan adalah mengubah *mind set* dan *culture set* sehingga ketika kita bekerja di bidang kearsipan harus memperlihatkan bahwa arsip

mempunyai peran yang lebih. Sebagai contoh, dalam mengelola arsip dinamis bagaimana arsip itu menjadi salah satu objek persyaratan dalam pemeriksaan oleh para auditor. Kalau ini berhasil maka dengan sendirinya lembaga akan lebih peduli untuk mengelola arsip dinamis secara tertib di lembaga atau instansinya masing-masing. Kemudian yang terkait dengan pengelolaan arsip statis adalah meyakinkan bahwa seluruh lembaga kearsipan baik itu provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi mampu secara optimal menyimpan *memory collective* daerah dan lingkungannya masing-masing. Keberadaan khazanah tersebut diharapkan bisa menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lewat pembuktian dari arsip yang dikelolanya.

Dalam kesempatan terpisah, Tasdik Kinanto memaparkan bahwa kebangkitan dalam bidang kearsipan dapat diwujudkan ANRI dengan mencari cara bagaimana menjadi leader, mendorong, mengkomunikasikan, mensosialisasikan secara tuntas supaya masyarakat dan penyelenggara negara menyadari betapa pentingnya arsip, tutur pria kelahiran Banyumas yang saat ini menjadi salah satu calon anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pendapat Sesmenpan dan Reformasi Birokrasi ini tentunya akan menjadi pendorong bagi Drs. Mustari Irawan selaku Kepala ANRI guna mewujudkan visi dan misinya, termasuk arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat pelantikan Desember 2013 lalu, yaitu bagaimana mengenalkan arsip sebagai bagian dari peningkatan pendidikan di sekolah.

Untuk mewujudkan itu, maka ANRI beserta jajarannya termasuk arsiparis harus bersinergi dalam melakukan pembinaan sistem kearsipan dan melaksanakan undang-undangnya. Khusus arsiparis, Mustari Irawan berharap bahwa kedepannya harus ada arsiparis ANRI yang mampu mengambil peran sebagai nara sumber dalam setiap momen yang terkait dengan masalah kearsipan, paparnya serius. Oleh karenanya, dirinya tak segan-segan memberikan kesempatan kepada arsiparis untuk berkiprah sebagai pembicara dalam forum SARBICA nanti. Ini semata-mata murni keinginan beliau guna mengangkat profesi arsiparis sehingga mampu sejajar dengan profesi lainnya, seperti peneliti maupun pustakawan.

Bagaimanapun juga peristiwa kebangkitan nasional dengan segala maknanya telah menginspirasi langkah kearsipan di Indonesia, bukan hanya kedekatan peringatan hari Kebangkitan Nasional dengan hari Kearsipan (tanggal 18 Mei) saja yang terpaut dua hari, tetapi juga rekam jejak spirit kebangsaan seyogyanya mampu menjiwai pelaku-pelaku kearsipan untuk sadar bergerak cepat dan tepat guna memberi peran arsip yang lebih baik dan ber'nas, sekali lagi semata-mata untuk kepentingan lembaga maupun negara. Semoga ANRI tetap jaya ! (BP. Widodo)



Khoerun Nisa Fadillah :

ARSIP DAN KELANCARAN PEMILU

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai manifestasi kebangkitan demokrasi nasional sejatinya menjadi sarana pelaksanaankedaulatanrakyat. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Melalui pemilu pula, rakyat dapat mencalonkan diri untuk duduk dalam jabatan legislatif maupun eksekutif. Namun hal itu tidak akan dapat terjamin sepanjang permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi polemik yang belum terpecahkan, sepanjang masih ada calon pemimpin bangsa yang menggunakan dokumen atau arsip palsu untuk memenuhi syarat duduk dalam sebuah jabatan, dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara masih rawan untuk dimanipulasi.

Ketika pemilu hanya dijadikan ajang untuk memperebutkan kekuasaan, maka segala cara akan dilakukan tanpa mengindahkan hakikat dari pemilu itu sendiri. Dalam tataran ini, hanya keautentikan dan

keterpercayaan arsip yang dapat kita andalkan.

Persoalan DPT

Meskipun kisruh DPT dalam pemilu legislatif 2014 telah diredam melalui Surat Keputusan KPU Nomor 240/Ktps/KPU/Tahun 2014 pada tanggal 15 Februari 2014 yang menetapkan jumlah DPT untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April 2014, dan melalui penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Perbaikan DPT pada rapat koordinasi antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (Parpol) peserta pemilu, dan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 25 Maret 2014, yang membahas penyempurnaan dan perbaikan DPT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid, kelengkapan data pemilih seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, memvalidasi pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/Polri, dan tak dikenal

di tempat tinggalnya (www.kpu.go.id.25/3/2014). Namun, persoalan DPT belum sepenuhnya selesai. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya warga yang belum mendapatkan formulir C6 (undangan pemungutan suara) karena belum terdaftar dalam DPT atau sebaliknya ada warga yang mendapatkan formulir C6 lebih dari satu atau ganda.

Ketidakakuratan DPT membuka potensi terjadinya praktik penyalahgunaan surat suara dan berimbas pada munculnya konflik dalam penyelenggaraan pemilu sehingga kelancaran penyelenggaraan pemilu dapat terganggu. Padahal permasalahan DPT dapat diatasi jika arsip kependudukan sebagai sumber informasi penyusunan DPT dikelola dengan baik dan benar sehingga keautentikan dan keterpercayaannya dapat diandalkan. Keandalan arsip kependudukan akan merekam peristiwa kependudukan (penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat



Suasana pemilu legislatif di salah satu Tempat Pemungutan Suara di daerah Jakarta. (09/04/2014.Dok. HM.ANRI)

keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap), atau pun peristiwa penting (kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan), secara faktual dan akurat, sehingga tidak akan adalagi anggota masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga tidak terdaftar dalam DPT, atau tidak akan adalagi anggota masyarakat yang memiliki KTP ganda sehingga terdaftar lebih dari satu kali dalam DPT, atau tidak akan adalagi anggota masyarakat yang sudah meninggal tanpa ada surat keterangan mati sehingga tetap terdaftar dalam DPT.

Arsip kependudukan yang andal akan menjamin DPT hanya berisi daftar warga negara yang berhak untuk memilih dalam pemilu yang

pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, disebutkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhak memilih adalah WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dan WNI tersebut hanya didaftar satu kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Arsip dan Kejujuran Calon Pemimpin Bangsa

Salah satu persyaratan kelengkapan administratif bakal calon legislatif sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa foto kopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan

menengah. Bukti kelulusan pendidikan terakhir ini sering menjadi penghambat beberapa oknum bakal calon legislatif untuk maju di bursa pemilu. Tak jarang terdapat calon legislatif terindikasi menggunakan ijazah palsu untuk memenuhi syarat tersebut. Penggunaan ijazah palsu ini jelas menciderai hakikat penyelenggaraan pemilu. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu justru dijadikan sebagai sarana untuk mengelabui rakyat.

Sebagai sebuah mekanisme pemilihan calon-calon pemimpin bangsa, pemilu justru hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Rakyat tentunya menginginkan calon-calon pemimpin bangsa yang jujur dan amanah sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Salah satu cara menguji kejujuran calon-calon pemimpin bangsa tersebut adalah dengan menguji keautentikan dan keterpercayaan

dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang digunakan untuk memenuhi kelengkapan administratif sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu. Hal ini menjadi penting karena hanya arsip yang autentik dan terpercayalah yang dapat diandalkan sebagai alat bukti yang sah sekaligus merupakan sumber informasi yang akurat dan faktual. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 Huruf b Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip yang autentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip, selanjutnya, arsip yang terpercaya adalah arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan, atau fakta, sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. Dengan demikian, penggunaan arsip yang autentik dan terpercaya dalam pemilu merupakan cermin kejujuran calon pemimpin bangsa sedangkan penggunaan arsip yang tidak autentik dan tidak terpercaya dalam pemilu merupakan cermin ketidakjujuran calon pemimpin bangsa.

Menekan Kerawanan Manipulasi Suara Rakyat

Dalam falsafah demokrasi, suara rakyat adalah suara tuhan, suara rakyat adalah kedaulatan tertinggi. Namun apa jadinya jika suara rakyat tersebut dimanipulasi hanya untuk melegitimasi kemenangan calon/peserta pemilu yang haus akan kekuasaan. Hal ini terindikasi dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Adanya pengaduan atau temuan mengenai ketidaksinkronan formulir C1 (rincian perolehan suara) KPU dengan formulir

C1 PPK (Pantia Pemilihan Kecamatan) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan, pemalsuan formulir C1, hingga pencoblosan surat suara sisa, semakin memperkuat adanya dugaan manipulasi suara dalam pemilu legislatif 9 April 2014. Tuntutan pengulangan proses pemungutan suara di beberapa tempat tidak dapat dihindarkan. Hal ini jelas mengganggu kelancaran pelaksanaan pemilu karena mengakibatkan terlambatnya penyelesaian rekapitulasi Suara Nasional yang seharusnya jatuh pada tanggal 6 Mei 2014 diundur hingga 9 Mei 2014.

Dalam konteks kearsipan, adanya ketidaksinkronan formulir C1 pada jenjang penyelenggara pemilu, pemalsuan formulir C1, dan pencoblosan surat suara sisa, lebih dikarenakan tidak berjalannya pengelolaan arsip yang andal dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April 2014. Adapun yang dimaksud dengan "pengelolaan arsip yang andal" sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf c Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah pengelolaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu menampung dan merespons kebutuhan perkembangan zaman. Sistem pengelolaan arsip yang andal memiliki kemampuan: menjanging atau menangkap (*capture*) semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi; menata arsip dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan organisasi; melindungi arsip dari perubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang; menjadi sumber utama informasi secara rutin mengenai kegiatan yang terekam dalam arsip; dan menyediakan akses terhadap semua arsip berikut beserta

metadatanya.

Dengan pengelolaan arsip yang andal, ketidaksinkronan formulir C1 pada jenjang penyelenggara pemilu akan dapat terurai karena tertata dengan cara yang mencerminkan proses kegiatan organisasi. Dengan pengelolaan arsip yang andal, pemalsuan formulir C1 tidak akan terjadi, karena terlindungi dari perubahan, pengurangan, penambahan atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan pengelolaan arsip yang andal, pencoblosan surat suara sisa tidak akan terjadi, karena informasi mengenai surat suara sisa tersedia berikut beserta metadatanya sehingga peluang terhadap penyalahgunaan terhadap suara sisa dapat tertutup. Dengan pengelolaan arsip yang andal, kerawanan manipulasi suara rakyat dapat ditekan.

Dalam penyelenggaraan pemilu, pengelolaan arsip yang andal merupakan hal yang paling mendasar yang dapat mengurai permasalahan yang selama ini mengganggu kelancaran proses pemilu. Namun demikian, pengelolaan arsip yang andal hanya akan dapat terwujud jika didasarkan pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Untuk itu, semestinya penyelenggaraan pemilu melibatkan lembaga kearsipan yang mampu mengawal pengelolaan arsip pemilu secara andal. Hal ini tidak saja bermanfaat untuk mendukung kelancaran proses pemilu, melainkan lebih dari itu, yakni untuk menyelamatkan bahan pertanggungjawaban dan memori demokrasi nasional.



Fauzan Anyasfika :

ARSIP, “SENJATA” PERANG ASIMETRIS

Pada sebuah artikel di laman elektronik yang berjudul “Rawan Ancaman, Indonesia Perkuat Batas Laut”, penulis mendapati pernyataan menarik dari Laksamana (Purn) Sumarjono tentang pandangannya terhadap kedaulatan teritorial Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Indonesia memiliki lima *choke point* (Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Timor –pen) dari sembilan *choke point* di seluruh dunia. Artinya, Indonesia sangat strategis di bidang perdagangan. Untuk itu tentunya kita memerlukan suatu alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk melaksanakan pengamanan wilayah tersebut. *Choke point* atau titik sumbat adalah istilah geografi transportasi yang merujuk pada sebuah lokasi yang memiliki kewenangan membatasi sirkulasi lalu lintas di suatu perairan.

Ditinjau dari *speech act theory*, Laksamana (Purn) Sumarjono meyakini kebenaran pernyataannya dan faktanya bisa dibuktikan di lapangan (*representative/asertif*) sekaligus mengajak untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang disampaikan itu (*direktif/impositif*) (lihat misalnya Suwito, “Sosiolinguistik: Teori dan Problem, 1982). Esensi dari pernyataan ini tentu berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan teritorial

(dalam Konsepsi Ketahanan Nasional yang dirumuskan Lemhannas (1989), masuk dalam gatra atau aspek geografi) Indonesia yang mana semua anak bangsa berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan setiap jengkalnya. Tentu tugas menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial Indonesia utamanya diperankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan luas wilayah daratan 1.922.570 km², lautan 3.257.483 km², dan sebanyak 13.466 pulau (Badan Informasi Geospasial, 2013) adalah masuk akal bila TNI membutuhkan alutsista yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan demikian simpulan sederhananya adalah alutsista merupakan elemen terpenting yang keberadaannya dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial. Simpulan ini sejalan dengan paradigma perang simetris (*hard power*), sebuah konsepsi perang yang menjadikan senjata sebagai “aktor utama”.

Berangkat dari uraian singkat di atas, penulis mengajukan masalah sengketa kepemilikan antara Indonesia dengan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai “antitesa” terhadap paradigma perang simetris.

Kita semua mengetahui bahwa melalui Keputusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, pada 17 Desember 2002 akhirnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan resmi menjadi milik Malaysia. Malaysia tidak menggunakan jalur perang simetris atau kekuatan fisik (senjata) untuk memenangkan hak kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Tanpa ada deru mesin-mesin tempur, tanpa adanya korban jiwa, dan biaya yang jauh lebih murah dari perang simetris, Malaysia sukses menambah luas wilayahnya melalui kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Mereka memilih cara perang asimetris (*smart power*) untuk melancarkan “serangannya”, konsep perang yang menjadikan data dan informasi sebagai “senjata” utamanya. Indonesia kalah karena “senjata” informasinya tak memadai. Dengan demikian, relevan rasanya bila kita mendiskusikan ulang peran alutsista sebagai elemen paling penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perang Asimetris

Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang

berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra; geografi, demografi, dan sumber daya alam, dan pancagatra; ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetri selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang (Dewan Riset Nasional, Suatu Pemikiran tentang Perang Asimetris, 2008). Lebih lanjut Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin (14/3/2012) sebagaimana dikutip oleh Arief Pranoto dalam artikel "Apa dan Bagaimana *Asymmetric Warfare* Berlangsung?" (2012) mengatakan, "Kita harus menanggalkan cara berpikir perang konvensional. Banyak hal yang terjadi tanpa disadari adalah dampak perang asimetri. Media digunakan sedemikian rupa mengumbar sensasi. Perang asimetri itu bukan menghadapkan senjata dengan senjata atau tentara melawan tentara". Penulis mencatat setidaknya ada tiga hal mendasar dari pengertian yang tersaji di atas, yakni adanya pihak yang berkonflik, pola perang yang ditempuh dengan cara-cara tidak biasa atau non-konvensional, dan adanya kekuatan yang tidak seimbang atau asimetris.

Malaysia, dengan data intelejen yang dimilikinya, tentu sudah berhitung seberapa besar kekuatan militernya bila dihadapkan dengan kekuatan militer Indonesia. Lembaga analisis militer, *Global Firepower*, yang menghimpun data dari *Central Intelligence Agency (CIA) Fact and Statistic* (di-update 8/8/2013), melansir daftar negara-negara dengan kekuatan perang terbesar di dunia. Dalam daftar tersebut, Indonesia menempati posisi 15, sementara Malaysia berada di posisi 33 (lihat Jurnal www.janes.com). Indonesia juga memiliki sekitar 107.538.660 penduduk yang dapat dijadikan tentara (komponen pendukung) dan luas wilayah dengan banyak pulau yang bisa menjadi keuntungan untuk pertahanan geografis. Potensi kekuatan pertahanan inilah yang menurut banyak pengamat militer, membuat Indonesia sulit ditaklukan

dengan perang terbuka dalam waktu singkat.

Atas dasar *mapping* kekuatan militer yang demikian, dapat terlihat kondisi yang tidak simetris antara kekuatan militer Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, meskipun sengketa kepemilikan pulau ini dimulai sejak 1967 yang ditandai dengan serangkaian perundingan bilateral hingga akhirnya pada 1997, Presiden Soeharto dan PM Mahatir Muhammad bersepakat untuk membawa sengketa ini ke tingkat Mahkamah Internasional -- Malaysia tidak akan mau menaikkan eskalasi konflik ke tahap yang lebih tinggi dari perundingan dan arbitrase atau memaksakan penyelesaian sengketa kepemilikan dengan cara-cara militer (perang simetris atau *hard power*) sebagaimana lazimnya penyelesaian konvensional masalah-masalah kedaulatan teritorial, melainkan memilih strategi di luar kebiasaan, perang asimetris dengan membasiskan diri pada kekuatan informasi untuk memenangkan sengketa perbatasan.

Malaysia menguasai informasi lebih banyak dari Indonesia atas kedua pulau tersebut. Keadaan ini menunjukkan kondisi yang tidak seimbang. Kekuatan informasi itu tergambar jelas dalam pernyataan Djoko Utomo (anggota Satuan Tugas Khusus Pulau Sipadan-Ligitan), "Kekalahan Indonesia karena Indonesia tidak dapat menunjukkan bukti (arsip) yang lebih kuat dari Malaysia atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Harus disadari bahwa bukti (arsip) dari Pemerintah Belanda dan Indonesia sangat kurang atau jauh lebih sedikit dibanding dengan Pemerintah Inggris dan Pemerintah Malaysia atas kedua pulau tersebut (Jurnal Kearsipan ANRI Vol.6, 2011). Mahkamah Internasional menganggap Malaysia, sebagai sebuah negara, lebih peduli dan memanfaatkan kedua pulau tersebut dengan baik. Ini dibuktikan dengan adanya pengadministrasian dalam bentuk ordonasi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu, dan membangun *light house* atau mercusuar. Perlu penulis sampaikan

disini bahwa ada keterkaitan antara informasi dan arsip. "Arsip adalah informasi. Ia bukan sembarang informasi, tetapi informasi yang direkam (*recorded*) atau rekaman informasi, yang dibuat, diterima, dan dipelihara dalam rangka pelaksanaan kegiatan (Walne (1998) sebagaimana dikutip oleh Djoko Utomo (2011)". Jelaslah sudah, Malaysia menerapkan model perang asimetris dalam sengketa kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Perang yang tidak menghadap-hadapkan antara senjata dengan senjata atau tentara dengan tentara, melainkan arsip dengan arsip!

Implikasi

Ada kecenderungan pergeseran pola perang yang diterapkan dunia saat ini yang perlahan mulai meninggalkan konsep perang simetris (*hard power*) dan beralih menggunakan perang asimetris (*smart power*) dalam memaksimalkan kepentingan nasionalnya. Model perang asimetris ini tidak membasiskan diri pada kekuatan fisik atau militer, melainkan pada kekuatan politik, intelejen, arsip, pembentukan opini, media massa, dan cara-cara lain di luar skema konvensional. Pihak yang menggunakan model ini paham betul akan kekuatan yang dimilikinya sehingga terciptalah kondisi yang tidak seimbang dalam "medan pertempuran". Malaysia pernah menerapkan perang model ini pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia. Dalam sengketa kedaulatan teritorial ini, tidak ada perang senjata, melainkan perang pembuktian (arsip). Kenyataan ini membawa implikasi, setidaknya terhadap dua hal, pertama arsip harus masuk dalam arus utama pemikiran atau konsepsi sistem pertahanan dan kedaulatan NKRI. Kedua, kebijakan pemerintah di bidang kearsipan.

Arsip harus masuk dalam arus utama pemikiran sistem pertahanan dan kedaulatan NKRI.

Selama ini, paradigma pemerintah dalam membangun sistem pertahanan lebih menitikberatkan pada penguatan militer dan alutsista. Hal ini tentu tidak

salah bila merujuk pada perkembangan militer negara tetangga dan dunia saat ini. Terlebih, menurut Dewan Analisis Strategis (DAS) Badan Intelijen Negara (BIN) (2014), ada pergeseran *centre of gravity global* dari Amerika Serikat ke arah Asia Pasifik yang utamanya karena adanya pergeseran kekuatan ekonomi di China, Jepang, dan India. Negara maju cenderung akan menebalkan anggaran militer untuk menjamin kepentingan nasionalnya. Fenomena ini mendasari pandangan bahwa militer tetap relevan dalam masalah ekonomi politik. Penguatan militer Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan kekuatan militer regional dan global serta sebagai bentuk kesiapan menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Bagi Indonesia, persoalan yang sifatnya ancaman terhadap negara, didominasi oleh masalah sengketa wilayah perbatasan dengan negara lain. *Institute for Defense, Security, and Peace Studies* (IDSPS), 2009, menyebutkan bahwa hingga saat ini Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa wilayah perbatasan yang belum terselesaikan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, dan Vietnam (sebagaimana dikutip oleh Azmi, *Jurnal Kearsipan ANRI* Vol. 6, 2011).

Bercermin pada pengalaman peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia, Pemerintah tentu harus memasukkan arsip dalam konsepsi pertahanan mengingat persoalan ancaman negara kita ke depan didominasi oleh masalah sengketa perbatasan yang notabene berkaitan erat dengan bukti (arsip). Apabila bukti (arsip) kepemilikan wilayah perbatasan tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah, maka ancaman terhadap kedaulatan teritorial semakin nyata. Dalam kepustakaan ilmu politik, kita mengenal adanya bukti pola (*pattern evidence*). Bukti pola pada model perang asimetris Pulau Sipadan dan Ligitan bukan tidak mungkin akan terjadi kembali. Dengan demikian, bila pemerintah tidak menyiapkan bukti (arsip) dengan baik, bukan hal mustahil satu per satu

“**Pengelolaan arsip wilayah perbatasan yang baik, akan berdampak pada perlindungan dan penyelamatan kedaulatan teritorial NKRI. Di bagian inilah, arsip bukan hanya untuk kearsipan, melainkan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**”

wilayah perbatasan kita akan beralih kepemilikan kepada negara tetangga. Asisten Deputi I Bidang Doktrin Strategi Pertahanan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Marsekal Pertama TNI Fahu Zaini, mengatakan bahwa Cina telah memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna ke dalam peta terbaru wilayahnya. Ini merupakan efek domino dari sengketa perebutan Pulau Spratly dan Paracel antara Cina dengan Filipina (dan Vietnam –pen). Kini, apa yang di prediksi oleh TNI dan para pengamat Hubungan Internasional telah terbukti, konflik Cina dengan Filipina dan Vietnam semakin tegang dan manifes. Kapal perang Cina dan Vietnam saling berbenturan di lautan. Bahkan muncul gerakan anti Cina di Filipina dan Vietnam. Oleh karena itu, sudah sewajarnya paradigma pemerintah kini tidak selalu menitikberatkan sistem pertahanan pada kekuatan militer. Peristiwa sejarah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan telah memberikan pelajaran berharga bahwa arsip ternyata memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan teritorial NKRI. Pemerintah harus memasukkan arsip dalam arus utama pemikiran atau konsepsi sistem pertahanan negara. Ini kondisi yang harus ada sebelum pemerintah menindaklanjutinya dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan Pemerintah di bidang kearsipan.

Jika paradigma pemerintah

mengenai peran penting arsip dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI sudah sedemikian rupa terbentuk, maka perhatian dan dukungan pemerintah terhadap urusan kearsipan semakin menguat. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pun akan semakin berdaya guna. Dalam undang-undang tersebut, arsip wilayah perbatasan merupakan jenis arsip terjaga, yaitu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Dengan demikian, negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan terhadap arsip yang berkaitan erat dengan kedaulatan negara tersebut. Pemerintah, melalui Arsip Nasional Republik Indonesia, bersama-sama pemerintah daerah, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan semua kementerian/ lembaga terkait harus melakukan pengelolaan terhadap arsip wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Pengelolaannya dilakukan melalui tahapan: identifikasi, pemberkasan, pembuatan daftar, pelaporan, penyampaian salinan autentik arsip, dan penyimpanan dokumentasi serah terima salinan autentik arsip (Azmi, *Jurnal Kearsipan ANRI* Vol.6, 2011). Dengan demikian, pengelolaan arsip wilayah perbatasan yang baik, akan berdampak pada perlindungan dan penyelamatan kedaulatan teritorial NKRI. Di bagian inilah, arsip bukan hanya untuk kearsipan, melainkan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ina Mirawati :

PEMBERANTASAN BUTA HURUF: SEBUAH CATATAN MENUJU SUKSESNYA KEBANGKITAN NASIONAL

Dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 (pascaperubahan) disebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pascaperubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan jelas mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap orang karena dengan pendidikan dapat menghindarkan diri dari kebodohan dan kemiskinan, meningkatkan pengetahuan, memperoleh prestasi dan yang terpenting adalah ada perasaan untuk membangkitkan nasionalisasi di hati setiap manusia terhadap bangsa dan negaranya.

Di dalam arsip pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terpeta dengan jelas bahwa bangsa Indonesia juga memperoleh pendidikan yang cukup layak walaupun mereka adalah rakyat berlatar belakang dari keluarga tidak mampu. Pemerintah Hindia Belanda masih memikirkan pendidikan untuk bangsa Indonesia, mereka mendirikan sekolah-sekolah dengan fasilitas seadanya. Gedung sekolah yang sederhana dibangun dan anak-



Presiden Soekarno sedang membantu mengajarkan masyarakat yang buta huruf di Yogya, 1946. ANRI, Foto IPPHOS No. 261

anak dengan berpakaian seadanya bersemangat belajar, bahkan guru yang mengajarkannya adalah orang pribumi juga. Tercatat bahwa anak-anak yang bertugas membantu orang tuanya di sawah diwajibkan untuk tetap bersekolah agar mereka terhindar dari buta huruf. Pembagian antara sekolah dan pekerjaan diatur sedemikian rupa sehingga sehabis pulang sekolah mereka dapat membantu orang tuanya. Pemerintah Hindia Belanda juga menganggarkan subsidi bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan. Contohnya pendidikan di Kalimantan Barat di mana anak-anak dapat menikmati pendidikan dengan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.

Masa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya adalah masa di mana pemimpin bangsa Indonesia mempergiat pendidikan melek huruf (*literacy*) bagi masyarakat Indonesia. Di sini terlihat bahwa ada hubungan antara masalah pemberantasan buta huruf dengan kebangkitan nasional ketika pada tanggal 27 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menyatakan hasratnya agar diadakan perguruan orang dewasa yang memberi pengajaran pemberantasan buta huruf hingga bersifat *volksuniversitet*. (Prof. Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, Gunung Agung, 1976, hlm 226).



LDH School di Medan.
ANRI, Foto KIT Sum-Ut No. 77/14

Adalah suatu hal yang mencengangkan bahwa untuk menggiatkan pemberantasan buta huruf ini maka Presiden Soekarno yang mengadakan kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyempatkan waktunya untuk mengajarkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang buta huruf. Terpampang dengan jelas spanduk dengan tulisan besar-besar “Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf”, di tempat di mana Presiden Soekarno mengajarkan membaca kepada masyarakat yang sangat antusias mengikutinya.

Para guru juga tidak bosan mengajarkan masyarakat untuk melek huruf. Setiap kelas selalu penuh dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin belajar sehingga mereka dapat membaca surat kabar yang biasanya ditempelkan di papan pengumuman oleh Dinas Jawatan Penerangan. Dalam Kongres Mahasiswa/Pelajar se-Nusa Tenggara Timur yang dilangsungkan pada 17-24 Juli 1957, salah satu keputusannya yang utama adalah mendesak pemerintah agar mengintensifkan pemberantasan buta huruf. Keputusan tersebut jelas menggambarkan bahwa masalah pendidikan, sehingga tidak ada lagi bangsa Indonesia yang buta

huruf, sangat penting bagi seluruh masyarakat.

Namun pendidikan tidak hanya terbatas pada dapat membaca, melainkan juga harus dapat membentuk masyarakat agar tetap konsisten dapat membaca kitab suci seperti yang terjadi di daerah Jawa

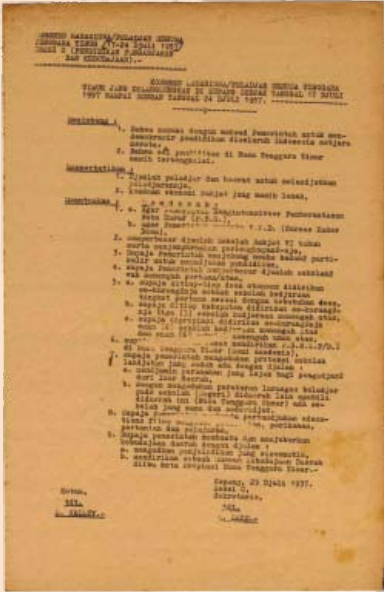
Barat, di mana daerah ini adalah salah satu daerah yang sangat kuat dengan ajaran agama Islamnya. Pemuka agama tidak melulu hanya mewajibkan anak-anak untuk belajar di sekolah umum tetapi anak-anak juga diajarkan pendidikan agama yaitu membaca Al Qur'an. Kegiatan ini juga merupakan salah satu cara untuk membangkitkan rasa nasionalisme di hati anak-anak bahwa mencerdaskan bangsa juga harus disertai dengan pendidikan agama sehingga dapat melahirkan putra-putri Indonesia yang sehat baik akal, moral maupun jasmani.

Menggambarkan upaya pemerintah Indonesia melakukan pemberantasan buta huruf dengan menampilkannya dalam sebuah foto adalah sangat menarik karena dengan foto kita dapat melihat situasi bagaimana keadaan pada sebuah masa dan membandingkannya dengan keadaan saat ini. Oleh karena foto adalah penyingkap sejarah, kehadiran visual yang melahirkan teks-teks baru dalam kehidupan, maka teksipun dapat

School	Aantal leerlingen		Absentie per-centage over Juni 1934.	Aantal onderwijzers.
	Jawa	Melayu		
VolksschoolFunda.-				
Volksschool te Ngabang	102 1)	54	86 2)	2.
idem te Sarimbou.	77		275	1.
idem te Sekendal.			212	1.
idem te Senakin.	18 3)		178	1.
idem te Sangkoe.	2 55 4)		-	1.
idem te Darit.	25 5)		185	1.
M i s s i e -				
Missievolksschool te Teudang.	12	--	7	1.
Chineesche scholen.				
Perit. school te Ngabang	30	4	7	2.
idem te Teudang	12	-	7	1.
idem te Moeza-Saba	20	10	7	1.
idem te Ijoeng	12	2	7	1.
idem te Perigi	25	-	7	1.
Totaal aantal leerlingen.				14.
1). Leerlingental per 1 Augustus 1934, w.o. 2 Chineseen.				
2). Absentiepercentage der vroegere standardschool over Juni 1934..				
3). Waarvan 4 Chinesee leerlingen.				
4). Aantal leerlingen dat door de ouders is toegesegd.				
5). Waarvan 1 Chinesee leerling.				
6). Namelijk 102 inheemsche en 11 Chinesee leerlingen.				

Bepaalt men hierbij zijn aandacht bij de onderwijverooriening der inheemsche bevolkinggroepen, dan bij het dat het hiermede uitermate slecht is gesteld. Reemt men dat van de 28,015 kinderen, die deze bevolkingsgroep in Landaek tellt, er 22,000 zijn die wegens hun leeftijd in de termen school kunnen vallen voor het volgen van volksonderwijs en tellt men anderszide het aantal kinderen op dat als leerling aan een der volksonderrichtingsscholen staat (inbegrepen, gevezen de absentiecijfers, in gesamen deele implicieert dat zij ook werkelijk geregeld de school bezoeken), dan vindt men bij vergelijking dezer cijfers een in het oog springende wanverhouding.				
Het totaal aantal leerlingen van inheemschen landaard bedraagt nu 192 1), waarvan ruim 1/2 van Malesischen landaard. Dit betekent dat iets meer dan 1/2 der inheemsche kinderen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen schoolorderwijs genieten van de Dajaksche bevolking zelfs niet meer dan ruim 1/2.				
Daga				
1) Dit cijfer zijn de 85 leerlingen welke de binnenkort te Sangkoe te openen Volksschool zullen bezoeken, mede opgenomen.				

Data tentang pendidikan di Kalimantan Barat tahun 1934.
ANRI, MvO West Borneo hlm. 52



Pemberantasan buta huruf harus diintensifkan. ANRI, Arsip Kabinet Presiden RI No. 1220/9



Pemberantasan Buta Huruf di Yogyakarta. ANRI, Foto Kempen DIY No. 432

menjelma ide dalam menerjemahkan kehidupan ke dalam bentuk yang konkret, visual. Fotografer menjadi penanda keberadaan foto dan teks pada suatu tempat dan menjadi bukti bahwa mereka ingin masuk dalam lingkaran hermeneutik.

Kemunculan fotografi membuktikan pencapaian visual yang tak terbantahkan, bagaimana imaji tercipta setelah melalui proses panjang dari Aristoteles hingga Daguerre dan dari kamera Obscura ke analog sampai ke era digital. Proses transformasi tersebut mengubah sistem nilai perekaman gambar kontemporer. Kode-kode visual maupun teks yang mewujud pada selembur kertas menjelma menjadi transformasi estetis, gambar berikutan teks melesat ke abad modern di mana nilai-nilai yang terkandung saat itu menjadi interpretatif sifatnya. Dalam sistem kebudayaan, foto berperan sebagai bukti tata nilai kemasyarakatan dengan segala aktifitas yang suka maupun yang duka. (Cahyadi Dewanto, "Relasi Kebudayaan, Lalu dan Kini", dalam Olivier Johannes Raap, *Soeka Doeka di Djawa Tempo Doeloe*, Jakarta, KPG, 2013, hlm. 182-185).



Sekolah membaca Al Qur'an di Jawa Barat (Jabar). ANRI, Foto KIT Jabar No. 355/16

Suatu bangsa tidak akan maju jika penduduknya terbelakang dan tidak dapat membaca atau menulis. Oleh karena itu program pemerintah untuk melakukan pemberantasan buta huruf merupakan sebuah catatan yang harus digarisbawahi sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi suatu bangsa yang eksis secara intelektual dan mempunyai rasa kebangkitan nasional yang tidak terbatas hanya terhadap satu sisi. Semua dapat kita pelajari dan telusuri dengan melihat arsip mengenai

pemberantasan buta huruf mulai dari masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang, baik arsip kertas, foto maupun filmnya.

Pemberantasan buta huruf yang dilakukan pemerintah adalah salah satu wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia dan merupakan sebuah catatan keberhasilan yang diraih dalam usaha kebangkitan nasional menuju Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur.

Dharwis W.U. Yacob :

TIRTO ADHI SOERJO: TOKOH KEBANGKITAN NASIONAL DAN PELOPOR POLITIK ARSIP

Raden Mas Djokomono Tirta Adhi Soerjo (Blora, 1880–1918) adalah tokoh kebangkitan nasional Indonesia, dikenal juga sebagai perintis persuratkabaran dan ke-wartawanan nasional Indonesia. Namanya sering disingkat Tirta Adhi Soerjo. Tirta Adhi Soerjo menerbitkan surat kabar *Soenda Berita* (1903-1905), *Medan Prijaji* (1907) dan *Putri Hindia* (1908). Tirta Adhi Soerjo juga mendirikan Sarikat Dagang Islam dan pemrakarsa Sarikat Islam.

Medan Prijaji dikenal sebagai surat kabar nasional pertama karena menggunakan bahasa Melayu (bahasa Indonesia), dan seluruh pekerja mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli.

Kisah perjuangan dan kehidupan Tirta Adhi Soerjo diangkat oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Tetralogi *Buru* dan *Sang Pemula*. Pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional. Pada tanggal 3 November 2006, Tirta Adhi Soerjo mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI no 85/TK/2006.

Tirta Adhi Soerjo lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan. Beliau adalah cucu R.M.T Tirtonoto, Bupati Bojonegoro yang



Tirta Adhi Soerjo (1880-1918)
Sumber: Koleksi Foto Hasta Mitra, tanpa tahun

dianugerahkan penghargaan bintang *Ridder Nederlandsche Leeuw* yang merupakan bintang penghargaan tertinggi Kerajaan Belanda. Dari garis ibu, ia adalah keturunan Mangkunegara I dan berada di derajat ke-4 dari Keraton Surakarta sekaligus keturunan ke-4 dari R.M.AA. Tjokronegoro, Bupati Blora. Ayah Tirta adalah R. Ngabehi Hadji Moehammad Chan Tirtodhipoero adalah pegawai Kantor Pajak. Tirta Adhi Soerjo adalah

anak kesembilan dari sebelas bersaudara. Setelah orang tuanya meninggal, Tirta Adhi Soerjo kemudian ikut neneknya Raden Ayu Tirtonoto. Dari neneknya inilah Tirta Adhi Soerjo diajarkan untuk menjadi manusia yang mandiri. Didikan neneknya telah menumbuhkan jiwa *entrepreneur* dalam diri Tirta Adhi Soerjo.

Setelah lulus dari *Europeesch Lagere School* (ELS) Tirta melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dokter Jawa atau *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) di Batavia. Namun, sekolahnya di STOVIA tidak dilanjutkan dan ia memutuskan untuk keluar pada tahun 1900. Nampaknya, beliau lebih memilih menjadi jurnalis serta menekuni bidang itu secara serius. Oleh karena kepandaiannya dalam dunia tulis-menulis, maka pada 2 April 1902, Tirta Adhi Soerjo diangkat sebagai redaktur *Pemberita Betawi* yang dipimpin oleh F. Wiggers dan pada 13 Mei 1902, ia berhasil naik pangkat menjadi pemimpin redaksi. Namun, jabatan tersebut hanya dipegangnya selama satu tahun karena berselisih paham dengan F. Wiggers. Kemudian, ia memutuskan untuk pindah ke Bandung pada tahun 1903.

Setelah menikah dengan R.A. Siti Habibah, ia tinggal di Desa Pasircabe, Kabupaten Bandung. Di sinilah ia

ditawari oleh Bupati Cianjur, R.A.A. Prawiradiredja, untuk menerbitkan surat kabar sendiri. Terbitlah *Soenda Berita* pada tahun 1903. Inilah surat kabar pribumi pertama berbahasa Melayu, yang dimodali, dicetak, ditangani oleh pribumi.

Soenda Berita berhenti terbit tahun 1906. Tirta Adhi Soerjo tinggal di Bogor, kemudian bersama beberapa priyayi di Batavia, mendirikan *Sarikat Prijaji* dengan anggota sekitar 700 orang dari berbagai daerah di Hindia Belanda. *Sarikat Prijaji* menginginkan sebuah surat kabar untuk corong suara mereka yang lebih dari *Soenda Berita* yang tak mau bicara politik. Maka pada 1 Januari 1907, diterbitkanlah *Medan Prijaji*. Sesuai dengan namanya, Medan Prijaji merupakan suara golongan priyayi.

Oleh karena dinilai terlalu vokal, Tirta Adhi Soerjo sering dibuang ke beberapa tempat seperti ke Lampung dan Ambon. Sejak pembuangannya ke Ambon, Tirta Adhi Soerjo tak mampu berbuat apa-apa dalam perkembangan kegiatan-kegiatan di Jawa. *Medan Prijaji* telah diberangus, dan Sarekat Islam jatuh ke tangan H.O.S. Tjokroaminoto, beberapa usaha yang dirintisnya pun telah diambil alih. Tirta Adhi Soerjo telah berakhir. Sebenarnya hanya enam bulan Tirta Adhi Soerjo menjalani masa pembuangan dan semua yang telah dirintis dan dibesarkannya selama bertahun-tahun kandas. Tak dapat ditolak bahwa sikapnya yang tidak mampu membatasi diri juga turut menyebabkan usahanya hancur. Tirta Adhi Soerjo kembali ke Jawa dalam keadaan tak memiliki apa-apa. Akhirnya pada 7 Desember 1918, Tirta Adhi Soerjo meninggal dunia di Batavia. Seorang sahabatnya, R. Goenawan menjelaskan bahwa beliau menderita disentri.

Tirta Adhi Soerjo dan Tokoh Kebangkitan Nasional

Selama ini Tirta Adhi Soerjo memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat umum, karena perannya



Koran Medan Prijaji edisi tanggal 2 April 1910

dalam pembentukan kesadaran awal kebangsaan selama ini tidak banyak dibahas dalam pelajaran-pelajaran sekolah dan hanya terbatas pada sejarah awal pendirian Sarekat Dagang Islam (SDI). Padahal, banyak pemikiran-pemikirannya yang telah ia curahkan dalam tulisan yang telah banyak memberikan pencerahan terhadap tokoh-tokoh pergerakan lainnya.

Tirta Adhi Soerjo atau biasa disingkat TAS merupakan salah satu tokoh pergerakan yang sangat penting perannya dalam kesadaran awal kebangsaan Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya, ia dengan berani menyatakan kritik-kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dinilai merugikan rakyat. Ia merupakan seorang tokoh bumiputera terdidik yang memelopori pergerakan dengan menggunakan surat kabar. Ia juga merupakan sosok Bumiputera yang menjadikan surat kabar sebagai sarana perjuangan melawan ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda. Beliau juga sering menekankan pentingnya organisasi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan bangsanya. Oleh karena

kritik pedasnya terhadap pemerintah Hindia Belanda dan beberapa kasus ketidakadilan yang ia ungkapkan dalam surat kabar, ia sempat beberapa kali ditangkap pemerintah Hindia Belanda. Namun, seluruh kerja kerasnya ternyata telah dilupakan oleh bangsanya sendiri.

Banyak pro dan kontra mengenai gerakan pertama kali yang berlingkup nasional yaitu antara adalah Sarekat Islam dan Boedi Oetomo. Orang tak sadar bahwa kedua gerakan yang dipertentangkan itu lahir dan bermula pada sumber yang sama, yakni Tirta Adhi Soerjo. Jadi tujuan Tirta Adhi Soerjo adalah memerdekakan. Dia dengan jelas memberitahu konsepsi kebangsaan itu tidak dibangun berdasarkan atas suku dan agama, tapi gerakan intelektual, kesadaran bahasa, dan keyakinan bertanah air. Jadi jika dicari semua gerakan itu, terutama gerakan nasionalis dan gerakan Islam, bersumbu pada sumber yang sama.

Pada 27 Maret 1909, di rumah Tirta Adhi Soerjo di Bogor terjadi pertemuan untuk pembentukan sebuah organisasi baru. Berdirilah Sarikat Dagang

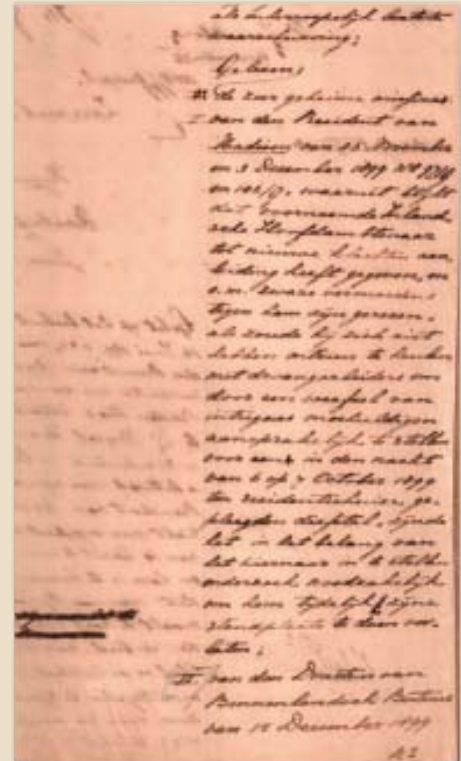
KHAZANAH

Islamiah di Bogor. Berbeda dengan Sarikat Prijaji yang menggaet para pegawai dan pekerja pemerintahan dari golongan pribumi (dan ternyata tidak efektif), Tirta Adhi Soerjo menjadikan perdagangan dan Islam sebagai sarana untuk menyatukan rakyat Hindia Belanda dalam organisasinya.

Pendirian Sarikat Dagang Islamiah bertujuan untuk melindungi pedagang Jawa dari pedagang besar Cina. Tirta Adhi Soerjo bertindak sebagai penanggung jawab. Sarikat Dagang Islamiah berusaha memboikot pedagang Cina agar tidak mendominasi perdagangan di wilayah Jawa. Akhirnya Sarikat Dagang Islamiah berdiri pada 5 April 1909. Kantor pusatnya berada di gedung sewaan di daerah Tanjakan Empang, Bogor. Secara administratif SDI hanya mendapatkan izin dari Kepala Negeri Bogor. Namun begitu kegiatan organisasi tetap berjalan dan bahkan SDI mengangkat C. J. Feith, Asisten Residen Bogor, sebagai pelindung.

Tirta Adhi Soerjo sendiri sering berkeliling untuk mempropagandakan SDI. Dari perjalanannya ini beliau mengenal seorang pedagang batik asal Solo bernama Haji Samanhoedi. Haji Samanhoedi kemudian memimpin SDI *Afdeeling* Solo sebagai cabang SDI Bogor. Sejak saat itu, Haji Samanhoedi menjadi orang kepercayaan Tirta Adhi Soerjo. Ketika pada 1912, Tirta Adhi Soerjo menghadapi perkara perdata karena utang-utangnya hingga akhirnya dijatuhi hukuman buang ke Ambon selama 6 bulan, Haji Samanhoedi mendapatkan mandat untuk menggantikannya mengurus SDI.

SDI kemudian menjadi Sarekat Islam adalah prakarsa Tirta Adhi



Surat Keputusan pengangkatan Raden Mas Adipati Brotodiningrat sebagai Bupati Madieon, Buitenzorg (Bogor), 7 Januari 1900 yang merupakan awal dari peristiwa politik arsip

Sumber: ANRI, Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit 1891-1942 No. 715

Soerjo. Sarekat Islam berdasarkan anggaran dasar presiden, sekretaris, *penningmeester* (bendahara), dan komisar. Tirta Adhi Soerjo ditunjuk sebagai *adviseur* (penasihat). Anggota Sarekat Islam tinggal di Lawean sedangkan Tirta Adhi Soerjo adalah satu-satunya anggota Sarekat Islam yang tinggal di Bogor. Kegiatan utama Sarekat Islam adalah sebagai organisasi yang berdiri di antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda pun siap menampung keluhan-keluhan yang diajukan Sarekat Islam.

Sarekat Islam ini terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun keagamaan masyarakat Jawa. Sarekat Islam kemudian menyebarkan pengaruhnya secara cepat pada kaum miskin di kota-kota dan tidak pula di daerah pedalaman. Pengikut Sarekat Islam terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh agama dan profesi.

Dari tahun 1912 sampai dengan tahun 1919, anggota Sarekat Islam berkembang pesat hingga berjumlah dua juta orang walaupun secara organisasi yang aktif hanya setengahnya. Sarekat Islam menjadi lambang solidaritas kelompok yang disatukan dengan kepentingan tertentu terutama kepada orang-orang Cina.

Pada perkembangan selanjutnya, Haji Samanhoedi mengajak serta seorang cendekiawan muslim yang taat dari Surabaya, H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokroaminoto mengusulkan agar organisasi jangan dibatasi pada para pedagang saja. Bersama-sama Tjokroaminoto, Haji Samanhoedi berusaha melanjutkan kelangsungan organisasi "peninggalan" Tirta Adhi Soerjo ini. Selanjutnya mereka berusaha agar Sarekat Islam mendapatkan status badan hukum dari *Gubernemen*. Namun usaha memperoleh pengakuan hukum

tersebut gagal setelah keluarnya surat penolakan dari Gubernur Jenderal Idenburg tertanggal 30 Juni 1913. Dalam surat tersebut Gubernur Jenderal tidak mengakui Sarekat Islam sebagai kumpulan yang mencakup seluruh Hindia Belanda, tetapi Gubernur Jenderal mengakui setiap *afdeeling*-nya sebagai sebuah badan hukum. Jadi Sarekat Islam sebuah organisasi lokal di setiap daerah-daerah. Sampai tahun 1914, telah terdapat lima puluh enam *Afdeeling* Sarekat Islam di seluruh Hindia Belanda yang diakui sebagai badan hukum.

Tirto Adhi Soerjo dan Pelopor Politik Arsip

Politik arsip merupakan konsep yang pertama kali diungkapkan secara implisit pada novel *Rumah Kaca* karangan Pramoedya Ananta Toer yang terbit pada tahun 1988. Dalam novelnya tersebut terdapat tokoh Minke (dalam kehidupan nyata adalah Tirto Adhi Soerjo) yang ditangkap dan ditahan lewat operasi pengarsipan yang rapi. Kegiatan pengarsipan ini menjadi salah kegiatan politik yang paling menakutkan bagi aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia di berbagai organisasi. Arsip menjadi alat deteksi untuk merekam segala kegiatan aktivis pergerakan kemerdekaan.

Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan publik untuk keseluruhan masyarakat. Objek dari politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Pengertian kebijaksanaan ini adalah merupakan proses membangun secara terarah melalui penggunaan kekuasaan. Kekuasaan ini merujuk kepada kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar sesuai dengan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. Konsep kekuasaan merupakan inti politik karena politik sebagai semua kegiatan yang berkaitan dengan memperebutkan dan mempertahankan

kekuasaan. Sedangkan arsip merupakan *first-hand knowledge* karena hasil yang diciptakan oleh arsip tanpa adanya kepentingan pribadi meskipun subyektivitas pribadi penciptanya tetap ada. Arsip diciptakan dengan ketelitian yang baik karena kesalahan dan pemalsuan akan merugikan kepentingan di masa yang akan datang. Arsip pun juga biasanya tersusun secara lengkap dan terpelihara karena diciptakan oleh organisasi-organisasi seperti pemerintah. Arsip itu dibuat untuk kepentingan praktis pemerintah itu sendiri sehingga subyektivitas berkadar kecil dan tanpa kepentingan pribadi.

Peristiwa yang mencuatkan nama Tirto Adhi Soerjo sebagai pelopor politik arsip adalah Skandal Donner. Skandal ini melibatkan nama Asisten Residen Madiun J.J. Donner yang pada

saat itu berupaya menurunkan Bupati Madiun, Raden Adipati Brotodiningrat. Untuk melancarkan usahanya Donner bersekongkol dengan Patih dan Kepala Jaksa Madiun, Mangoen Atmodjo dan Adipoetro. Donner lantas mengirim surat kepada Gubernur Jenderal melalui *Algemene Secretarie* (mirip seperti Sekretariat Negara sekarang) yang memberitahukan bahwa Brotodiningrat sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam berbagai kerusuhan di Madiun.

Di lain pihak, Tirto Adhi Soerjo mengumpulkan data tentang ketidakbenaran tindakan J.J. Donner termasuk mengumpulkan arsip yang berkaitan dengan laporan tersebut termasuk dimasukkan ke dalam tulisannya di *Pemberita Betawi* bawah rubrik *Dreyfusiana* dengan mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut



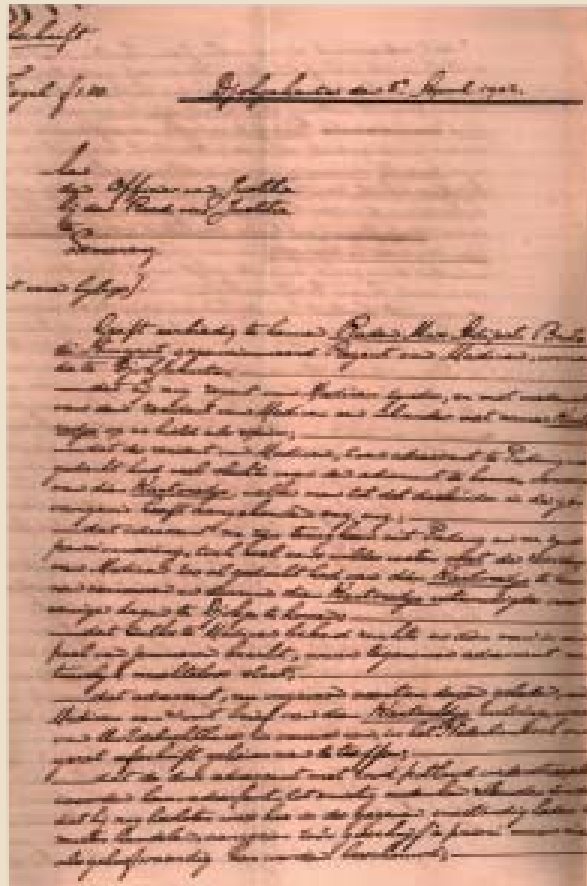
Surat permintaan dari *Algemene Secretarie* untuk menunjuk Snouck Hurgronje untuk menangani kasus Raden Adipati Brotodiningrat untuk memeriksa kebenaran atas arsip yang telah dibuat oleh *Algemene Secretarie*, 12 Februari 1902
Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit 1891-1942 No. 4025*

KHAZANAH

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan yang menggunakan arsip *Algemene Secretarie*. Tulisan yang menggemparkan dan membawa namanya dikenal sebagai wartawan muda pribumi yang berani menentang pemerintah kolonial. Tirta Adhi Soerjo memberikan saran agar pemerintah mengadakan penyelidikan atas kasus tersebut. Meskipun Tirta Adhi Soerjo telah menuliskan banyak artikel di koran-koran yang memberitahukan bahwa laporan J.J. Donner adalah tidak benar.

Selain itu, artikel-artikel Tirta Adhi Soerjo tetap mengungkapkan ketidakadilan atas pencopotan Bupati Madiun. Akhirnya *Algemene Secretarie* memerintahkan *Adviseur voor Inlandsche Zaken* (Penasihat Urusan Pribumi) C. Snouck Hurgronje untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan J.J. Donner pada Gubernur Jenderal. C. Snouck Hurgronje dalam suratnya pada 29 Desember 1902 kepada Gubernur Jenderal Willem Roseboom mendapatkan kesimpulan bahwa tuduhan J.J. Donner pada Raden Adipati Brotodiningrat adalah kesimpulan yang salah. Raden Adipati Brotodiningrat dianggap sebagai korban salah tafsir. Namun, surat Snouck Hurgronje ini menjadi sia-sia karena Raden Adipati Brotodiningrat telah sampai di pembuangannya di Padang.

Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa Tirta Adhi Soerjo merupakan tokoh kebangkitan nasional dan pelopor politik arsip yang handal. Hancurnya Sarekat Prijaji tidak membuat Tirta berhenti untuk memajukan bangsanya. Dia tetap melakukan usahanya untuk membangkitkan kesadaran bangsanya yaitu kesadaran untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada tahun 1907, Tirta Adhi Soerjo mendirikan



Surat berisi pembuangan Raden Adipati Brotodiningrat ke Padang, 5 April 1902
Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie*
Series Grote Bundel Besluit 1891-1942
No. 4025

Medan Prijaji (MP). *Medan Prijaji* inilah yang kemudian dijadikan Tirta sebagai alat untuk memajukan bangsanya. Keluhan-keluhan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat bangsanya disuarakan lewat *Medan Prijaji*. Usaha Tirta Adhi Soerjo membangkitkan kesadaran bangsanya lewat alat yang lebih modern dapat dilihat sebagai kesadaran maju bagi bangkitnya gerakan pembebasan. Oleh karena lewat koran inilah gagasan nasionalisme tertulis pertama kali dan dibaca menjadi pembentuk kesadaran awal tentang nasionalisme melampaui perbedaan agama, suku, dan organisasi.

Tidak puas dengan usahanya

memajukan bangsanya lewat media, pada tahun 1909, Tirta Adhi Soerjo mendirikan organisasi pergerakan yang sepanjang sejarah Indonesia sangat terkenal yaitu Sarikat Dagang Islamiah (SDI). Sarikat Dagang Islamiah berdiri sebagai antitesis dari Sarekat Prijaji dan Boedi Oetomo yang tidak bisa merangkul semua golongan yang ada di Hindia Belanda. Tirta Adhi Soerjo pulalah rancangan pertama Sarekat Islam yang melahirkan banyak sekali tokoh pergerakan, baik kiri, tengah, maupun kanan di Hindia Belanda. Tirta Adhi Soerjolah yang menyatukan tradisi pergerakan dan tradisi pers untuk satu tujuan, yakni kesadaran berbangsa. Selain itu pula, Tirta Adhi Soerjo merupakan tokoh pelopor politik arsip yang berkembang

di pemerintah kolonial Belanda. Kekuatan arsip mampu mengalahkan kekuasaan seseorang. Tirta Adhi Soerjo mengungkapkan bahwa kekuatan arsip dalam menjawab segala persoalan di masyarakat utamanya perlawanan dalam ketidakbenaran suatu peristiwa terutama yang terjadi pada pemerintahan masalah kolonial. Arsip mampu mengalahkan konflik yang tidak berdasar karena arsip sebagai bukti yang obyektif menjadi pelopor penggunaan arsip dalam tulisan-tulisannya bahkan menjadi bukti-bukti kuat dalam tulisannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tirta Adhi Soerjo merupakan tokoh kebangkitan nasional dan pelopor politik arsip yang layak diteladani.

Sepak Terjang Tasdik Kinanto

REFORMASI BIROKRASI DIMULAI DARI INTERNAL

Dalam lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Tasdik Kinanto merupakan salah seorang yang memegang peranan penting. Peran dan karirnya dalam dunia birokrasi tidak diragukan lagi. Tasdik Kinanto lahir pada 14 September 1954 di Bumiayu, Jawa Tengah. Ia tinggal di Bumiayu hingga lulus sekolah dasar. Kemudian pindah ke Semarang mengikuti orang tua yang mendapat tugas di Semarang. Mulai SMP kelas satu hingga SMA kelas satu, dihabiskannya di Semarang. Ketika memasuki kelas 2 SMA, orang tuanya mendapat tugas ke Malang, oleh sebab itu Tasdik pindah sekolah ke Malang. Setelah lulus SMAN 4 Malang jurusan IPA, Tasdik kembali ke Semarang. Keinginannya setelah lulus sekolah adalah melanjutkan sekolah agar bisa menjadi seorang dokter atau ABRI. Oleh sebab itu, ia mendaftar di fakultas kedokteran Universitas Diponegoro sebagai pilihan pertama, fakultas teknik sebagai pilihan kedua dan fakultas hukum sebagai pilihan ketiga.

Namun Allah SWT berkehendak lain, Tasdik Kinanto justru diterima pada pilihan ketiga, yaitu di Fakultas Hukum UNDIP pada 1974. Pada mulanya ada rasa “galau” karena tidak diterima dalam pilihan pertama dan keduanya, namun bekat nasihat ibunya, Tasdik mulai menjalani kuliahnya di Fakultas Hukum UNDIP. Tak kenal maka tak sayang, pepatah itu lah yang dirasakan oleh Tasdik Kinanto, setelah beberapa bulan “terjun” dalam perkuliahan di Fakultas Hukum, ia mulai merasa “enjoy” mengikuti setiap mata kuliah. Masa kuliahnya juga diisi dengan berorganisasi di kampus. Kesenangannya dalam berorganisasi membawanya pada posisi sebagai Ketua Senat Mahasiswa pada 1977 dan Ketua BPM (Badan Permusyawaratan Mahasiswa). Pada akhir 1979, Tasdik lulus dari Fakultas Hukum UNDIP. Pada 1980, Tasdik

Kinanto mencoba melamar pekerjaan di dua tempat, yaitu di Kejaksaan Agung dan Sekretariat Negara. Dari kedua lamaran yang dikirimkannya, Sekretariat Negara yang paling cepat memberikan respon. Walaupun saat itu ia belum diwisuda, ia sudah diperbantukan di Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Perjalanan karir Tasdik Kinanto diawali dengan menjadi Staf Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di tahun 1980. Selang beberapa saat kemudian, ia mendapat amanah untuk menduduki jabatan eselon IV. Karirnya dalam dunia birokrasi terus menanjak. Setelah beberapa saat menduduki jabatan sebagai eselon IV, Tasdik Kinanto dipromosikan untuk menjadi Asisten Deputi Urusan Kinerja Pelayanan Publik pada tahun 2000. Pada tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Korporatisasi dan Kinerja Badan Usaha Pemerintah pada Deputi Menpan Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik tahun 2001, Asisten Deputi Urusan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik pada Deputi MenPAN Bidang Pelayanan Publik tahun 2001 – 2004, Asisten Deputi Urusan

Pembinaan Karier SDM Aparatur pada Deputi Men. PAN Bidang SDM Aparatur Tahun 2004 – 2005 ia juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli MenPAN bidang Budaya Kerja dan menjadi Deputi SDM bidang Aparatur. Harapannya untuk dapat lebih berperan dalam Kementerian PAN guna memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT. Ia dilantik menjadi Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2007 hingga saat ini (2014). Selama menjabat sebagai SesMenPAN, Tasdik Kinanto pernah melayani tiga orang menteri : Taufik Efendi, EE Mangindaan dan Azwar Abubakar. Selain karier yang telah ia rintis beberapa Pendidikan Non-Formal juga telah pernah ia ikuti yaitu : Sepala Tahun 1993, Spadya Tahun 1995, Spamen Tahun 1997, Dkiklatpim Tk.1 Tahun 2004, Manajemen Audit Tahun 1985, Pengawasan Fungsional tahun 1987, Waskat Tahun 1995. Disamping itu, Tasdik Kinanto juga melakukan studi banding di berbagai negara tentang berbagai aspek pemerintahan. Di era reformasi ia juga terlibat





Wawancara Tim Majalah ARSIP dengan Tasdik Kinanto

langsung dalam penyusunan Undang-Undang (UU) diantaranya UU Pelayanan Publik, UU Kearsipan, UU Kementerian Negara, UU Aparatur Sipil Negara dan UU yang sedang dibahas di DPR seperti UU tentang Administrasi Pemerintahan dan UU tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Dengan adanya undang-undang tersebut sangat diharapkan akan memperkuat dan mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi kedepan. Tasdik Kinanto juga pernah menerima beberapa penghargaan dari Presiden Republik Indonesia antara lain, Satyalancana Karya Satya X Tahun 1996, Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2001, Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2010.

Sebagai SesMenPAN selain kesibukan rutin dalam melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder Kementerian PAN, Tasdik Kinanto juga melakukan reformasi birokrasi dalam tubuh Kementerian PAN sendiri. "Sebelum menerapkan reformasi birokrasi keluar, Kementerian PAN harus menerapkan reformasi birokrasi di internal Kementerian PAN" kata Bapak yang aktif dalam organisasi mahasiswa selama kuliah di Fakultas Hukum UNDIP. Gerakan reformasi birokrasi internal di Kementerian PAN sudah dimulai sejak 2004, namun secara intens baru mulai 2009.

Menurut Tasdik Kinanto, keberadaan dan peran Kementerian PAN selalu menyesuaikan dengan dinamika kehidupan pemerintahan. "Dibawah kepemimpinan presiden mulai dari Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, semua memiliki

style kepemimpinan yang berbeda-beda, itu sangat berpengaruh terhadap dinamika kehidupan pemerintahan secara menyeluruh" kata Tasdik Kinanto dalam wawancaranya dengan Majalah Arsip. Hal-hal yang merupakan isu pokok dan menjadi core bisnis dari Kementerian PAN : bagaimana membenahi organisasi pemerintahan di pusat dan daerah, perbaikan sistem manajemen PNS, mendorong peningkatan pengawasan agar lebih efektif, efisien dan masalah pelayanan publik. "Isu-isu tersebut tidak akan pernah hilang" kata bapak yang pernah bercita-cita menjadi dokter ini.

Dalam era globalisasi disemua negara, kebutuhan tentang pembenahan berbagai sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintahan terus dilaksanakan dan tidak akan selesai disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan terus berkembang. "Hanya pemerintah yang diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas yang bisa menjawab dan merespon dengan cepat terhadap masalah yang dihadapi bangsanya" kata Tasdik. Dalam perjalanan karirnya di Kementerian PAN, masalah yang paling menarik bagi lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah Reformasi Birokrasi. Menurutnya yang harus dipahami oleh birokrat, masyarakat dan semua pihak bahwa reformasi pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana, sistemik dan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dengan tujuan dan strategi yang jelas, dengan program-program yang jelas dan ini harus dilakukan oleh semua elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah. "Tantangannya

luar biasa, yaitu ketika harus merubah teman-teman sendiri yang resisten, karena sudah berada dalam zona aman dan nyaman. Karena hakikat reformasi adalah perubahan mendasar yang terkait dengan *mindset* dan *culturalset* serta perubahan sistem tata laksana pemerintahan. Jika tidak mau berubah maka sebaiknya minggir saja," katanya. Salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang modern adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai kebangkitan, sebagai upaya kita untuk membangun bangsa melalui pembenahan birokrasi. Kebangkitan nasional pada hakikatnya adalah semangat untuk mendorong setiap insan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan oleh *founding fathers* kita. Reformasi birokrasi pada hakikatnya membangkitkan kita, mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Mengenai reformasi dan kebangkitan nasional Tasdik Kinanto berpendapat bahwa dalam momentum kebangkitan semua elemen bangsa harus bangkit, sadar bahwa kita masih banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tidak seperti yang kita harapkan, Disini dibutuhkan pemimpin yang punya kapasitas *leadership* yang luar biasa sehingga dapat membangkitkan potensi-potensi bangsa dengan cepat dalam memberikan yang terbaik. Kebangkitan dalam bidang kearsipan dapat diwujudkan ANRI dengan mencari cara bagaimana menjadi *leader*, mendorong, mengkomunikasikan, mensosialisasikan supaya masyarakat dan penyelenggara negara sadar betapa pentingnya arsip. "Mimpi kita bagaimana supaya punya sistem kearsipan nasional yang terpadu, terintegrasi, lengkap dan modern. Siapapun yang memimpin ANRI kedepan harus bisa mewujudkan itu. Peran ANRI sebagai pembina harus melatih tenaga arsiparis dan kesejahteraannya jugaharusdipikirkan. Mengurus arsip merupakan tugas mulia. Proses menata arsip dengan baik juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. "Menjadi aparatur yang profesional di bidang kearsipan harus menjadi kebanggaan karena dia melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa" kata Tasdik. (SS)

Dhani Sugiharto :

RESTORASI DIGITAL FILM KONFERENSI ASIA AFRIKA

Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan dokumentasi penyelenggaraan konferensi 29 negara-negara Asia dan Afrika diikuti oleh ribuan peserta yang dilaksanakan di Gedung Merdeka dan Gedung Dwi Warna Kota Bandung, Indonesia pada tanggal 18 – 24 April 1955. Dokumen/arsip ini berupa media kertas, foto, dan film. KAA merupakan perhelatan internasional pertama yang dihadiri oleh negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan untuk membebaskan diri dari kolonialisme. KAA menghasilkan sebuah komunikasi final yang di dalamnya memuat “Dasa Sila Bandung”, yang berhasil menjadi *trigger* perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan dan kedaulatan sebuah negara. KAA juga menjadi tonggak sejarah munculnya kesadaran untuk membentuk gerakan non blok, yang berfungsi sebagai penyeimbang dominasi blok barat dan timur pada era perang dingin hingga runtuhnya negara Uni Soviet.

Arsip KAA tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terdiri dari berbagai bentuk dan media, yaitu arsip kertas, foto, dan film. Sebagian arsip KAA tersebut telah disusun dan dirangkai menjadi sebuah film dengan judul “Arsip Konferensi Asia-Afrika yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia”, yang merupakan sebuah film yang menarik dengan narasi bahasa Indonesia dan diiringi musik perjuangan. Film ini merupakan sebuah film yang dibuat dalam rangka pengajuan arsip KAA sebagai *Memory of the World* (MOW), yang memvisualisasikan konferensi.

Restorasi Arsip Film KAA

Restorasi artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan



Konferensi Asia Afrika di Bandung, 18 – 24 April 1955
(Sumber : ANRI - Kempen Jawa Barat 550201)

semula. Restorasi pada arsip film dimaksudkan untuk mengembalikan bentuk dan media arsip film menjadi seperti semula atau menyerupai bentuk aslinya. Karena arsip KAA terdiri dari berbagai media berupa kertas, foto dan film, maka restorasi arsip KAA dilakukan sesuai dengan media arsipnya. Arsip foto di restorasi dengan membersihkan fisik aslinya, arsip kertas di restorasi dengan metode *leafcasting* atau penambalan menggunakan bubur kertas. Sedangkan film direstorasi fisiknya menggunakan larutan kimia pada sepanjang *reel* film. Restorasi juga dapat dilakukan secara digital. Restorasi pada *image* atau gambar diam (arsip foto dan kertas) bisa dilakukan dengan *software* pengolahan image seperti Adobe Photoshop atau Corel Draw. Khusus restorasi film digital dilakukan dengan *software* khusus untuk membersihkan *scratch* (bercak) dan garis-garis yang ada pada gambar bergerak sepanjang reel film untuk membuat gambar kembali bersih dan warnanya lebih kontras.

Tujuan dari restorasi adalah untuk membuat film tersebut bisa bertahan lama tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. Dalam istilah yang lebih modern, pelestarian film mencakup penanganan, duplikasi, penyimpanan, dan akses. Di Amerika, 90 persen film bisu dibuat sebelum tahun 1929 dan 50 persen film release dibuat sebelum tahun 1950. Film-film yang sudah berusia tersebut mulai terdegradasi dan mengalami penurunan kualitas berupa munculnya penyakit film seperti jamur, warna yang pudar, bercak dan bahkan *vinegar sindrom*, yaitu bau asam seperti cuka yang merusak bahan film. Hal ini mendorong upaya penyelamatan dan pelestarian arsip-arsip film ke media yang lebih aman. Upaya penyelamatan film di dunia sudah dimulai sejak tahun 1980 melalui dokumen yang diterbitkan oleh UNESCO : UNESCO, *Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images*, 27 October 1980.

Penurunan Kualitas Film

Suatu tanda bahwa film tersebut

PRESERVASI

mulai terdeteriorasi/terindikasi rusak yaitu mulai tercium bau asam, seperti cuka yang kuat menunjukkan deteriorasi jenis dasar *acetate*, *acid* yang dikenal sebagai *Vinegar Syndrome*. Kerusakan ini terjadi karena adanya *group acetyl* yang lepas disebabkan uap lembab, panas dan asam yang bergabung dengan air membentuk *Acetid Acid*. Asam ini dilepaskan dalam *base* film tetapi lambat laun menyebar pada permukaan dan menyebabkan bau asam yang tajam.

Sebagian besar film yang dibuat sebelum tahun 1929 yang merupakan *silent* film atau film bisu merupakan jenis film yang difilmkan pada kondisi tidak stabil saat pembuatannya, mudah terbakar karena berbahan dasar nitrat, dan membutuhkan tempat penyimpanan khusus. Masalah penurunan kualitas tidak terbatas pada film-film nitrat. Peneliti pada industri film telah melakukan riset bahwa film warna yang berbahan selulose asetat juga mengalami penurunan kualitas meskipun lebih baik bahan filmnya dibandingkan film nitrat. Film selulosa asetat, terancam mengalami pembusukan dan penurunan kualitas dengan munculnya jamur dan penyakit *Vinegar Syndrome*. Pada tingkatan tinggi terjadi pengkeritingan atau Pengelupasan lapisan emulsi yang mengakibatkan hilangnya informasi yang terekam dalam film tersebut.

Kerusakan karena air biasanya menyebabkan film yang melengkung atau kehilangan emulsi. Noda pada film yang dapat terjadi baik pada lapisan base maupun emulsi. Karat Iron oxide dari logam akan menghasilkan gambar kotor atau warna kemerahan, demikian juga noda dari minuman atau makanan yang tertumpah pada film, yang dapat mengakibatkan efek *ferrotyping*, *blocking*, dan munculnya jamur.

Tempat Penyimpanan Khusus untuk Arsip Film

Cara terbaik untuk melestarikan film adalah dengan perlindungan yang tepat dari kekuatan eksternal, yaitu tempat penyimpanan yang khusus dengan suhu dan kelembaban yang dikontrol. Langkah-langkah ini merupakan upaya terbaik untuk

menghambat kerusakan film daripada metode lain dan merupakan solusi yang lebih murah daripada melakukan alih media film ke bentuk lain yang membutuhkan sarana prasarana yang mahal.

Dalam menyimpan arsip sudah seharusnya mengacu pada standar yang sudah ada, yaitu Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman Preservasi Arsip Statis. Dalam Perka tersebut salah satunya disebutkan bahwa arsip statis disimpan dalam suatu depot arsip, yakni bangunan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelestarian terhadap arsip yang tersimpan di dalamnya.

Tempat penyimpanan arsip statis seharusnya sudah dirancang khusus dengan mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya lokasi, struktur, media simpan dan rak simpannya. Untuk merancang depot arsip film tentu berbeda dengan arsip video atau arsip kertas. Karena bahan dasar media simpan yang berbeda memberikan perlakuan berbeda dalam cara penanganan dan menyimpannya. Ruang penyimpanan yang ideal untuk arsip film hitam putih 10° C sampai 15° C dengan kelembaban 40 – 45 % dan

untuk film berwarna 0° C sampai 10° C.

Mempersiapkan Restorasi Film secara Fisik

Film reel biasanya hanya dilakukan restorasi fisik yaitu membersihkan bahan film dengan larutan kimia tertentu. Restorasi fisik ini ditekankan pada upaya mempertahankan polaritas gambar dan keutuhan bahan dasar film yaitu selulose asetat. Sebagian praktisi film berpendapat bahwa restorasi fisik lebih utama dengan pemulihan melalui proses fotokimia atau digital, yang akhirnya dipindahkan ke bentuk media lainnya, karena tidak ada media digital yang benar-benar telah terbukti secara permanen menyimpan dalam waktu tak terhingga karena perkembangan dan pergeseran format data yang sangat pesat. Sementara sebagian praktisi film lainnya yang merupakan komunitas kearsipan merasa bahwa konversi film menjadi film digital akan mengalami penurunan kualitas terkait peralatan yang digunakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengkonversi film dengan resolusi yang tinggi. Teknologi digital imaging telah menjadi semakin maju dimana alat untuk mengkonversi film menjadi



Arsip film yang akan direstorasi



Tempat penyimpanan arsip film

digital sudah mendekati resolusi 8K yang dapat menangkap resolusi gambar secara utuh setinggi 65 mm.

Permasalahan dalam Restorasi Film Digital

Dalam konteks pelestarian film secara digital perlu ditekankan penggunaan teknologi untuk transfer film disesuaikan dengan ukuran film reel tersebut apakah 8 mm, 16 mm, 35 mm atau 70mm. Kerusakan film (yang disebabkan cairan, film keriting, terlipat atau robek akibat cahaya terus menerus, fluktuasi suhu, kelembaban, dll) secara signifikan menambah permasalahan dalam proses pelestarian jangka panjang. Restorasi merupakan upaya pengembalian ke kondisi semula, jika film yang di restorasi kondisinya sangat buruk, kerusakan pada gambar sangat banyak, adanya cairan yang merusak rangkaian film maka tingkat kesulitan menjadi bertambah.

Biaya juga merupakan permasalahan dalam restorasi karena dibutuhkan peralatan canggih dengan biaya mahal. Peralatan canggih ini berupa super komputer dengan spesifikasi kelas tinggi dan *software* khusus untuk restorasi digital. *Software* untuk restorasi harus mempunyai fitur khusus yaitu mampu menghilangkan noda film / goresan, kedip-kedip kecil pada reel film, fungsi stabilisasi dan

perbaikan kerusakan film lainnya yang dikerjakan secara digital. Pada tahun 2014, sebuah organisasi *non-profit* *Martin Scorsese Film Foundation* melakukan restorasi film berwarna membutuhkan biaya rata-rata 50.000 – 100.000 US dollar, dengan resolusi digital 2K atau 4K. Tingkat kerusakan fisik dan kimia pada film mempengaruhi tingkat kesulitan saat melakukan restorasi. Karena itulah dibutuhkan biaya mahal, proses rumit yang harus ditangani oleh ahli restorasi dan waktu yang bisa sangat lama untuk detail perbaikannya.

Tahapan dalam Restorasi Digital

Sebuah film yang akan direstorasi perlu dipersiapkan langkah-langkahnya. Dalam hal pembuatan film “Arsip Konferensi Asia-Afrika yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia”, ANRI melakukan langkah-langkah sebagai berikut, pertama, pembentukan tim penyusunan film dan restorasi film. Tim ini terdiri dari tim ANRI yang terdiri dari Ahli Sejarah, Ahli Digitalisasi, Narator, *Translator*, Materi dan tim Editing dari sebuah Rumah Produksi “13 Entertainment”.

Kedua, penyusunan *storyboard* film. Ketiga, materi film yang akan di restorasi dan disusun dalam rangkaian film dikumpulkan. Keempat, film diperiksa kondisinya secara fisik, untuk kesesuaian saat mentransfer

menggunakan film *scanner* atau *telecine*.

Kelima, film direstorasi secara fisik dengan larutan kimia khusus untuk membersihkan kotoran/debu, goresan, cairan, warna pudar dan kerusakan lainnya, dan kemudian juga perlu disambung film yang putus menggunakan film *splicer*.

Keenam, setelah film diperiksa dan dibersihkan kemudian ditransfer melalui *telecine* atau film *scanner* film ke *harddisk*, dan *track audio* disinkronisasikan dengan gambar filmnya.

Ketujuh, hasil digital film disusun dalam *timeline* komputer editing, di sesuaikan dengan *storyboard* yang telah dibuat. Kedelapan, dibuat *tittle*, *credit tittle*, dan *ending tittle*.

Kesembilan, melakukan rekaman narasi. Kesepuluh, menambahkan musik pengiring yang dikombinasikan. Kesebelas, *finishing edit*. Terakhir, setelah versi di-*release*, dilakukan restorasi digital dengan penekanan

Restorasi adalah upaya perbaikan arsip yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan informasi kepada keadaan semula. Restorasi film secara digital dilakukan dengan *software* khusus untuk membersihkan *scratch* (bercak), garis-garis yang ada pada gambar bergerak sepanjang reel film untuk membuat gambar kembali bersih dan warnanya lebih kontras, untuk menghilangkan noda film, kedip-kedip kecil pada reel film, fungsi stabilisasi dan perbaikan kerusakan film lainnya yang dikerjakan secara digital.

Pembuatan dan restorasi film “Arsip Konferensi Asia-Afrika yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia” dibuat dalam rangka pengajaran arsip KAA sebagai *Memory of the World* (MOW), untuk memvisualisasikan konferensi tersebut, dibuat berdasarkan arsip yang tersimpan di ANRI diantaranya arsip film, foto dan kertas.

Dwi Nurmaningsih :

GUIDE ARSIP, MENDEKATKAN ARSIP DENGAN PENGGUNA

Menurut Anthony Giddens (1996), arsip dibentuk dengan berbagai cara dengan berbagai macam tujuan termasuk untuk mengingat, dan memperkuat jati diri. Dalam ranah ini sekaligus terkait dengan bagaimana proses melupakannya. Pernyataan ini diperkuat oleh Verne Harris (2001) yang mengungkapkan bahwa gambaran jati diri suatu negara dilihat melalui beragam dokumen dasar dan melalui sikap lembaga yang menghimpun dokumen-dokumen tersebut. Dengan demikian karakter suatu bangsa dapat terlihat dari bagaimana arsip yang merupakan rekaman kegiatan ini dikumpulkan, diberkaskan, ditata, dan dilestarikan, sehingga arsip dapat diakses secara utuh dan lengkap dengan tujuan untuk memperkuat jati diri bangsa.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan lembaga kearsipan nasional sebagai representasi keberadaan negara yang memiliki kewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan. ANRI harus dapat menjamin kemudahan akses kepada user terhadap khazanah arsip statis yang berada di bawah kewenangannya, sesuai dengan kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aksesibilitas suatu arsip tergantung pada pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan yang ditujukan



contoh guide arsip yang dibuat per media dilakukan oleh *National Archives of Australia*, diberi judul *Australia in Focus, Photographs in the National Archives* (by Peter Nagle) dan *Sound Recording in the National Archives* (by Helen Cross and Margareth Chambers).

untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengolahan arsip statis pada lembaga kearsipan, sehingga arsip statis dapat diakses dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan publik.

Finding Aids

Sarana bantu penemuan kembali (*finding aids*) arsip statis merupakan hasil (*output*) dari kegiatan pengolahan arsip statis yang disimpan di lembaga kearsipan. *Finding aids* digunakan untuk mengakses arsip dari berbagai *creator*, sesuai dengan aturan multilevel deskripsi hingga level berkas bahkan adapula sampai tingkat item.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas asal usul (*Principle of provenance*) dan asas aturan asli (*Principle of original order*). Asas/prinsip asal usul, merupakan asas yang menitik beratkan pada asal pencipta arsip. Pengaturan arsip yang didasarkan pada darimana pencipta arsip berasal, dimaksudkan untuk mempertahankan konteks penciptaan arsip. Asas/prinsip aturan asli, merupakan asas/prinsip pengaturan arsip yang memfokuskan pada sistem pengaturan arsip ketika arsip digunakan oleh penciptanya atau pengaturan ketika arsip tersebut masih dinamis. Pengaturan arsip yang didasarkan pada aturan asli

dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan realibilitas arsip.

Salah satu tugas dari pengelolaan arsip statis adalah mengolah arsip hasil akuisisi hingga menghasilkan sarana bantu penemuan kembali (*finding aids*), sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 97 butir (2) bahwa sarana bantu temu balik meliputi *guide* arsip, daftar arsip statis, dan inventaris arsip.

Sebagai *primary finding aids*, daftar dan inventaris disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang menciptakannya (*provenance*). Penyusunan ini mencerminkan pengaturan arsip pada masa dinamisnya. Apabila ketika dilakukan akuisi pada arsip tersebut dalam keadaan tidak teratur, maka harus dilakukan rekonstruksi terlebih dahulu untuk mengembalikan pengaturan arsipnya. Namun jika dalam pengolahan arsip, suatu khazanah tidak dapat ditemukan lagi asal usul dan aturan aslinya, maka barulah dibuat pengaturan berdasarkan *artificial*, dapat diterapkan berdasarkan prinsip fungsional, restorasi, organisasi, masalah, atau kegunaan.

Bagi *user*, pengaturan arsip berdasarkan fungsi dan tugas sering kali dirasakan menjadi kendala dalam penemuan kembalinya, karena pertama, *user* tidak mengetahui fungsi dan tugas dari organisasi pencipta arsip. Kedua, *user* tidak memiliki waktu untuk membaca pendahuluan inventaris/daftar, yang di dalamnya terdapat gambaran tentang fungsi dan tugas organisasi pencipta. Ketiga, *user* menitikberatkan pencarian arsipnya berdasarkan pada masalah/subyek.

Dalam menjembatani kebutuhan *finding aids* yang *user friendly*, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah kearsipan dalam pembuatan *finding*

aids, sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam *International Standard Archival Description* (ISAD (G)), maka khazanah arsip yang terdapat di lembaga kearsipan dapat dibuatkan *secondary finding aids*, yaitu *guide arsip* statis.

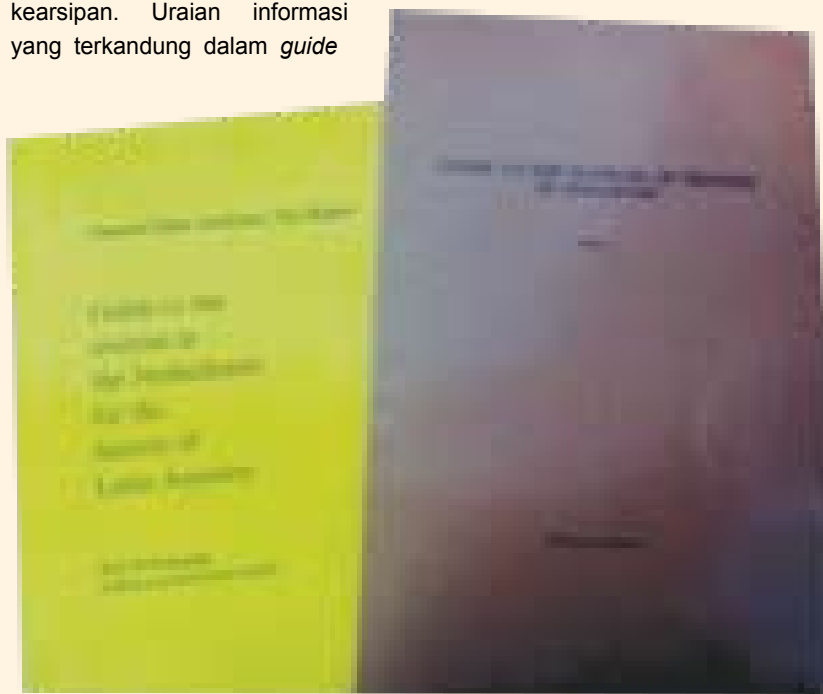
Guide Arsip

Apa itu *guide arsip* ? Dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis, *guide arsip* statis adalah sarana bantu penemuan kembali arsip statis berupa naskah dinas yang memuat uraian informasi mengenai khazanah arsip statis yang tersimpan di lembaga kearsipan (*guide* khazanah) dan uraian informasi yang disusun secara tematis (*guide* tematis).

Guide arsip khazanah biasanya memuat seluruh arsip yang dimiliki dan disimpan oleh lembaga kearsipan. Uraian informasi yang terkandung dalam *guide*

arsip khazanah biasanya memuat: nama pencipta arsip (*provenance*), yang berisi tentang uraian sejarah pencipta arsip; periode arsip, mendeskripsikan mengenai periode/ kurun waktu terciptanya arsip, volume arsip, menerangkan jumlah khazanah arsip yang dimasukkan ke dalam *guide arsip*, uraian isi, menguraikan materi informasi tentang khazanah arsip, dan contoh arsip disertai nomor arsip dan uraian deskripsi arsip.

Guide arsip tematis merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis dari khazanah arsip statis yang disimpan lembaga kearsipan, berupa uraian informasi mengenai suatu tema tertentu yang sumber-sumber arsipnya berasal dari khazanah arsip statis yang disimpan di lembaga kearsipan. Uraian informasi yang terkandung dalam *guide arsip* tematis memuat antara lain: nama pencipta arsip; periode arsip; nomor dan



Kiri: Contoh *guide arsip* tematis yang dibuat oleh lembaga kearsipan Kota Den Haag (The Hague) Belanda, dengan judul *Guide to the Sources in the Netherlands for the history of Latin America* (by M.P.H. Roessingh), sumbernya berasal dari dokumen, manuskrip, peta dan repro peta topografi. Kanan: *guide arsip* tematis yang dibuat oleh National Archives of Singapore, dengan judul *Guide to the Sources of History in Singapore* (Vol.I)

uraian deskripsi; dan isi ringkas sesuai dengan tema *guide* arsip statis.

Kelebihan *guide* arsip dibandingkan dengan *primary finding aids* yakni pertama, *guide* arsip dapat memuat seluruh informasi arsip dari berbagai media, baik secara sendiri-sendiri maupun secara gabungan. Salah satu contoh *guide* arsip khazanah yang memuat arsip dari seluruh media adalah *Guide to Federal Records in the National Archives of the United States* (by Robert B. Matchette et.al). *Guide* arsip ini berisi tentang arsip pemerintah pusat yang diperoleh dari hasil akuisisi sesudah tahun 1995. Di dalamnya terdapat sampel arsip tekstual, peta dan kearsitekturan, film, video, rekaman suara, microfilm, dan foto. Sementara itu contoh *guide* arsip yang dibuat per media dilakukan oleh *National Archives of Australia*, diberi judul *Australia in Focus, Photographs in the National Archives* (by Peter Nagle) dan *Sound Recording in the National Archives* (by Helen Cross and Margareth Chambers). Masing-masing dari *guide* arsip ini mengkhususkan informasi tentang seluruh khazanah di media yang terpisah, yaitu khusus pada foto dan rekaman suara saja, namun dari khazanah seluruh *provenance* yang berada di bawah kewenangannya.

Kedua, *guide* arsip merupakan *finding aids* yang memberikan informasi gabungan dari beberapa *provenance* dan disatukan dalam sebuah tema besar. Contoh *guide* arsip tematis yang dibuat oleh *National Archives of Singapore*, dengan judul *Guide to the Sources of History in Singapore* (Vol.I). Pada dasarnya informasi yang terdapat di dalam *guide* arsip ini terdiri atas arsip-arsip pemerintah dan lembaga negara yang diserahkan dan berada dalam kewenangan *National Archives of Singapore*. Arsip ini telah lebih dari dua puluh tahun terbuka untuk publik. Penyusunannya terbagi atas pembabakan periode sejarah Singapura, sebagian besar isi



contoh *guide* arsip yang dibuat oleh *Nationaal Archief/NA* (Belanda), dengan judul *Sources for the Mutual History of Ghana and the Netherlands, An annotated guide to the Dutch archives relating to Ghana and West Africa in the Nationaal Archief, 1593-1960s* (by Michel R. Doortmont & Jinna Smit).

informasi adalah manuskrip (tulisan tangan atau cetak), hasil *print* atau mikrofilm. Isi deskripsi yang tercakup hingga level *series* saja, dilengkapi dengan judul inventaris, tahun, volume, jenis media, bahasa, pembagian aksesibilitas (A berarti bebas diakses, B berarti pembatasan akses). Dalam pendahuluan *guide* arsip ini, disebutkan pula bahwa mereka sedang dalam pengerjaan volume II untuk *guide* arsip yang sama. Dalam volume II mereka akan memasukkan tidak hanya arsip pemerintah, tetapi juga khazanah arsip pribadi yang berada di *National Archives* dan khazanah arsip di institusi lain seperti perpustakaan nasional, Museum Nasional dan *The Institute of Southeast Asian Studies*.

Ketiga, informasi di dalam *guide* arsip juga tidak terbatas pada khazanah yang ada di lembaga kearsipan saja, dalam artian bahwa materi *guide* arsip dapat merupakan gabungan antara arsip dinamis dan statis, bahkan juga bahan pustaka. Hal yang menarik dari

materi *guide* arsip ini, di dalamnya ada daftar dari beberapa arsip departemen yang belum dipindahkan ke lembaga kearsipan Kota Den Haag. Dalam *guide* arsip ini terdapat juga arsip/manuskrip yang disimpan di perpustakaan, museum dan institusi lain yang isinya berkaitan dengan tema *guide* arsip.

Keempat, penyusunan *guide* arsip bersifat fleksibel, dalam arti bahwa *guide* arsip khazanah dapat digabungkan dengan *guide* arsip tematis, bahkan dapat sekaligus dengan penulisan naskah sumber (*bronnen publikatie*). Hal ini dapat dilihat pada contoh *guide* arsip yang dibuat oleh *Nationaal Archief/NA* (Belanda), dengan judul *Sources for the Mutual History of Ghana and the Netherlands, An annotated guide to the Dutch archives relating to Ghana and West Africa in the Nationaal Archief, 1593-1960s* (by Michel R. Doortmont & Jinna Smit). Pada bagian pertama, *guide* arsip ini memberikan informasi tentang khazanah yang ada di NA dan di luar NA, sesuai tema. Bagian kedua, berisi penulisan naskah sumber dengan mengutip langsung arsip sesuai tema dan sekaligus menyebutkan sumber arsip yang diambil.

Dari empat kelebihan *guide* arsip tersebut, pengguna dapat lebih leluasa memanfaatkan arsip sesuai dengan tema atau masalah yang dikehendaki. Di samping memudahkan, pengguna pun tak perlu lagi mencari satu persatu ke dalam daftar atau inventaris dari berbagai macam *provenance*, yang mungkin banyak menyita waktu. Pendekatan ini hanya dapat dilakukan apabila setiap khazanah yang akan disusun ke dalam sebuah *guide* arsip sudah memiliki *finding aids*. *Guide* arsip membuat aksesibilitas arsip di ruang layanan meningkat dan memudahkan *user* menemukan masalah/tema arsip yang dikehendaki (*user friendly*).

Satimin :

AKUNTABILITAS DALAM PEMUSNAHAN ARSIP

Asian Development Bank menyatakan bahwa tata pemerintah yang baik didasari empat pilar utama yaitu: *accountability, transparency, predictability, and participation*. Pernyataan tersebut dikutip oleh Loina Lalolo dalam bukunya yang berjudul “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi”, (Loina Lalolo, 2003:7). Lebih lanjut Loina Lalolo menyatakan bahwa kunci dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari instansi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang dianut dan berlaku di masyarakat. Prinsip akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Akuntabilitas sebuah instansi sangat bergantung pada ketersediaan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. Informasi tersebut dapat kita dapatkan dalam arsip khususnya arsip dinamis yang ada di masing-masing instansi. Dalam konsiderasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Kearsipan adalah untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Premis dalam undang-undang kearsipan ini adalah apabila penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan dengan baik maka akan membantu mewujudkan akuntabilitas sehingga upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat tercapai. Bahkan akuntabilitas juga sangat perlu diwujudkan dalam manajemen kearsipan itu sendiri.

Dalam konteks manajemen kearsipan, arsip dikenal memiliki daur hidup arsip/ *life cycle of records* dimulai dari fase *creation, distribution, use, maintenance, disposal*. Penyusutan arsip terbagi kedalam tiga bentuk kegiatan yaitu: kegiatan pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit

kearsipan, kegiatan pemusnahan arsip dan kegiatan penyerahan arsip statis dari pencipta arsip ke lembaga kearsipan. Masing-masing kegiatan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan-peraturan teknis turunannya. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas memiliki tantangannya masing-masing, namun demikian kegiatan yang paling krusial adalah kegiatan pemusnahan arsip. Kegiatan pemusnahan dianggap paling krusial karena menyangkut ketersediaan arsip. Sekali arsip dimusnahkan maka tidak akan ada lagi sumber informasi yang nilainya sepadan dengan arsip yang dimusnahkan tersebut.

Diskusi tentang pemusnahan arsip dan akuntabilitas menjadi menarik karena jika kita cermati di dalam kegiatan pemusnahan arsip setidaknya dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan arsip oleh pencipta arsip dan akuntabilitas layanan persetujuan pemusnahan arsip oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Salah satu tolok ukur akuntabilitas yang harus ditunjukkan oleh pencipta arsip adalah bahwa pencipta arsip harus menaati ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai alat bantu untuk menentukan

arsip mana yang dapat diusulkan musnah dan arsip mana yang tidak boleh diusulkan musnah. Sedangkan akuntabilitas layanan persetujuan pemusnahan yang diselenggarakan oleh ANRI dapat dilihat dari kepatuhan ANRI terhadap prosedur dan mekanisme layanan.

Kewenangan persetujuan JRA bersifat sangat sentralistik artinya seluruh penyusunan JRA harus mendapat persetujuan dari Kepala ANRI. Hal ini menjadi sangat wajar karena ANRI sebagai representasi dari kewenangan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan di bidang kearsipan harus mampu untuk menjadi pengendali dan penyelamat arsip dan kearsipan nasional. Dalam konteks penyusutan, penyelamatan arsip setidaknya mempunyai dua dimensi yaitu penyelamatan arsip statis dan penyelamatan arsip dari pihak-pihak yang tidak berhak.

Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir kesalahan dalam melakukan penyeleksian arsip yang akan dimusnahkan maka disusunlah Pedoman Pemusnahan Arsip yang tertuang di dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip. Dalam pedoman ini kita dapat simak bahwa dalam kegiatan pemusnahan sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan nilai guna arsip tersebut. Prinsip kehati-hatian terlihat jelas dalam prosedur dan mekanisme pemberian pelayanan persetujuan arsip usul musnah. Prosedur pemusnahan diatur, pertama, pembentukan panitia penilai instansi. Panitia penilai instansi adalah panitia penilai arsip yang dibentuk oleh pimpinan instansi dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur: pimpinan unit kearsipan, pimpinan unit pengolah dan arsiparis.

Kedua, penyeleksian/penilaian arsip. Penyeleksian arsip dilakukan

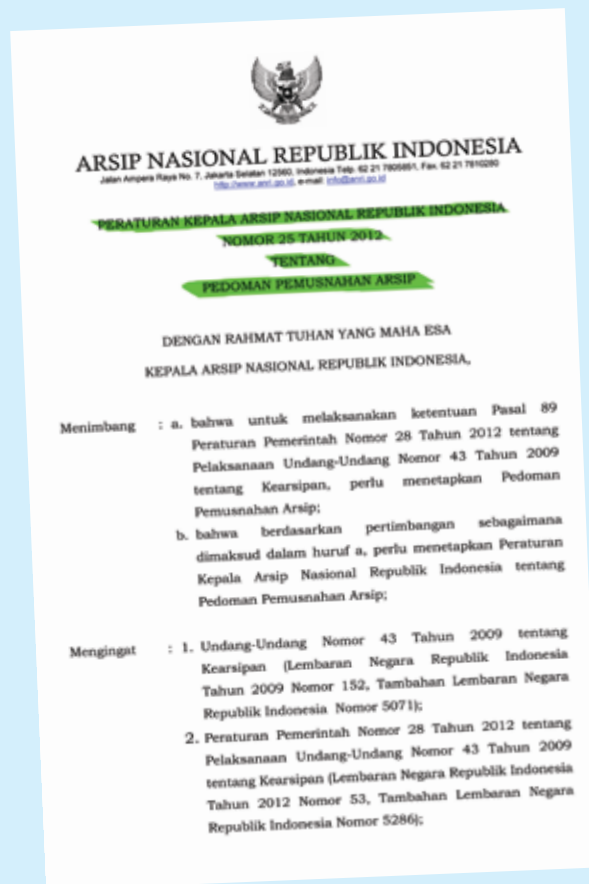
oleh panitia penilai berdasarkan JRA. Hal ini dilakukan jika pencipta arsip sudah memiliki JRA, apabila pencipta arsip belum memiliki JRA maka arsip tersebut harus dinilai terlebih dahulu oleh panitia penilai instansi.

Ketiga, pembuatan daftar arsip usul musnah. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah. daftar arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi: nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan.

Keempat, penilaian oleh panitia penilai arsip. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis panitia penilai instansi.

Kelima, permintaan persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip. Persetujuan pemusnahan arsip dibedakan dalam 2 cara:

a) Pemusnahan arsip berdasarkan JRA bagi arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta BUMN/BUMD dan Swasta. Perguruan Tinggi Swasta dan Perusahaan Swasta yang terikat dalam ketentuan ini adalah Perguruan Tinggi Swasta dan Perusahaan Swasta yang kegiatannya dibiayai oleh anggaran Negara dan atau bantuan luar negeri. Untuk arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun cukup persetujuan pimpinan pencipta arsip tembusan kepada



Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.

Kepala ANRI. Untuk pemusnahan arsip Lembaga Negara baik yang memiliki retensi di bawah atau di atas 10 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.

b) Pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI tanpa membedakan retensinya.

Keenam, penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan pencipta arsip.

Ketujuh, pelaksanaan pemusnahan. Berdasarkan ketentuan prosedur pemusnahan arsip tersebut di atas maka setiap permintaan pelayanan persetujuan pemusnahan arsip harus dilengkapi dengan surat pertimbangan dari panitia penilai arsip instansi, daftar arsip Usul musnah, dan Jadwal Retensi Arsip terbaru yang telah disetujui Kepala ANRI (jika ada).

Berdasarkan uraian prosedur dan mekanisme layanan persetujuan pemusnahan arsip di atas setidaknya terdapat dua hal yang menarik dalam konteks bahasan ini. 2 hal tersebut yaitu, pertama, kewenangan persetujuan pemusnahan arsip.

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip kewenangan persetujuan pemusnahan arsip dibagi menjadi dua yaitu menjadi kewenangan pimpinan pencipta arsip dan kewenangan Kepala ANRI. Pembagian kewenangan pemusnahan arsip berlaku bagi pemusnahan arsip di pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Dengan adanya pembagian kewenangan persetujuan pemusnahan arsip maka seolah-olah ANRI ikut bertanggungjawab terhadap akuntabilitas instansi pencipta arsip. Jika kita telaah lebih dalam bahwa pembagian kewenangan ini

mendasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan jangkauan kewilayahan dan pertimbangan kemungkinan keberadaan arsip statis yang diindikasikan oleh lamanya jangka simpan arsip. Jangka simpan tersebut dalam ketentuan perundangan ditetapkan dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Dengan diterbitkannya Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan menggambarkan bahwa ANRI dapat membantu pencipta arsip untuk dapat mengidentifikasi arsip statis yang tercipta dengan mengambil peran sebagai filter terakhir dalam kegiatan pemusnahan arsip. Peran dan kewenangan tersebut tentu tidak diputuskan dengan serta merta, karena jika kita menilik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tentang Kearsipan khususnya pasal 29 ayat (3) disana disebutkan bahwa tanggung jawab pengelolaan arsip dinamis adalah menjadi tanggungjawab pencipta arsip. Sehingga jika ditinjau dari kewenangan persetujuan pemusnahan arsip maka posisi ANRI lebih berfokus pada penyelamatan arsip statis yang tercipta sedangkan pengelolaan arsip dinamis diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi pencipta. Dengan demikian keutuhan arsip yang menjadi sumber informasi primer bagi penjaminan akuntabilitas lembaga sepenuhnya tanggungjawab pencipta arsip dan ANRI tidak masuk dalam ranah akuntabilitas instansi/pencipta arsip.

Kedua, pertimbangan panitia penilai arsip instansi. Pertimbangan tertulis panitia penilai arsip diwajibkan dalam prosedur dan mekanisme persetujuan pemusnahan arsip dan menjadi salah satu kelengkapan berkas dalam permintaan persetujuan pemusnahan arsip baik permintaan persetujuan yang ditujukan kepada pimpinan pencipta arsip maupun

kepada Kepala ANRI. Pertimbangan panitia penilai dalam memberikan rekomendasinya harus memperhatikan kriteria arsip yang dapat dimusnahkan yaitu: (a) Tidak memiliki nilai guna (b) Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA (c) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan (d) Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Panitia penilai instansi sebelum memberikan rekomendasi wajib memastikan bahwa arsip yang diusulkan musnah sudah memenuhi. Kriteria-kriteria yang sangat erat kaitannya dengan prinsip akuntabilitas tersebut. Dalam hal permintaan persetujuan pemusnahan kepada Kepala ANRI maka rekomendasi panitia penilai instansi menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan dengan alasan bahwa tanggung jawab pengelolaan arsip dinamis adalah tanggung jawab pencipta arsip. ANRI hanya akan berfokus pada peran penyeleksian arsip statis untuk kemudian arsip statis tersebut direkomendasikan untuk dapat diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pelayanan pemberian persetujuan pemusnahan arsip oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI tidak bertanggung jawab terhadap akuntabilitas pemusnahan arsip suatu lembaga/instansi karena tanggung jawab pengelolaan arsip dinamis merupakan tanggung jawab pencipta arsip. Namun demikian ANRI bertanggung jawab terhadap akuntabilitas layanan persetujuan pemusnahan arsip.

Adhie Gesit Pambudi :

ARCHIVAL MANAGEMENT PLAN

TITIK BALIK KEBANGKITAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DI ANRI

Momentum kebangkitan nasional menjadi momentum kebangkitan bangsa Indonesia dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang termasuk bidang kearsipan. Salah satu aspek penting dalam bidang kearsipan adalah menyimpan arsip statis yang merupakan memori kolektif dan warisan budaya yang merekam bukti sejarah kebangkitan bangsa Indonesia di berbagai bidang. Oleh karena itu, pelestarian arsip statis yang optimal menjadi bagian penting dari kebangkitan bangsa di bidang kearsipan.

Lembaga kearsipan adalah organisasi yang memegang peran vital dalam kebangkitan bangsa dalam bidang kearsipan terutama fungsinya sebagai pelestari arsip statis yang didayagunakan seluas-luasnya untuk kepentingan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 59 ayat (1), pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengelolaan arsip statis di tingkat nasional dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Arsip statis yang diterima oleh ANRI berasal dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip statis ini bermuara pada penyediaan akses arsip statis kepada pengguna arsip pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Upaya pengelolaan arsip statis di ANRI merupakan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan pemanfaatan arsip.

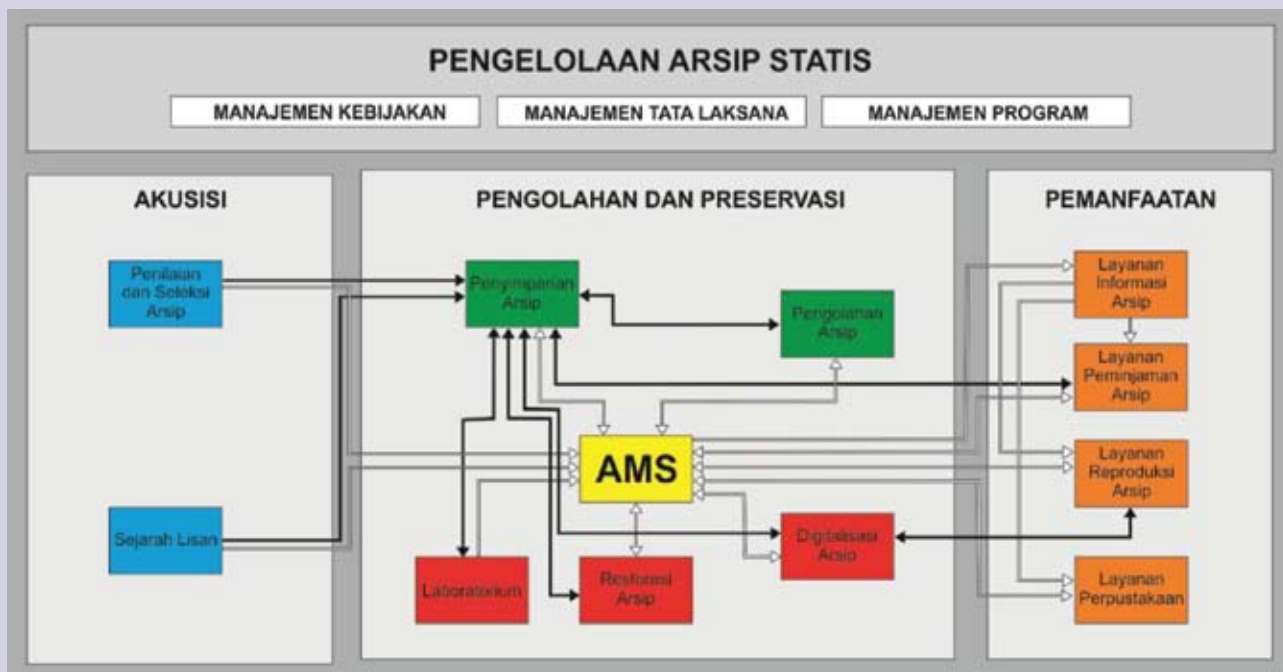
Archival Management Plan (AMP)

Kebangkitan ANRI sebagai

lembaga kearsipan nasional dapat dilihat dari keberhasilan organisasi ini dalam kegiatan pengelolaan arsip statis yang dilakukan secara terpadu. Hal ini dilakukan melalui program peningkatan mutu pengelolaan arsip statis dalam bentuk *Archival Management Plan* (AMP) yang mensinergikan kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan pemanfaatan arsip statis dengan tujuan pelestarian arsip dan penyediaan akses bagi pengguna arsip yang optimal.

Apa itu *Archival Management Plan*?

AMP merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan arsip statis di berbagai negara di dunia. Lembaga kearsipan di negara-negara maju menjadikan AMP sebagai tulang punggung pengelolaan arsip statis mereka dalam pelestarian dan penyediaan akses arsip bagi pengguna arsip. AMP merupakan *master plan* pengelolaan arsip statis di lembaga kearsipan sejak tahap kegiatan akuisisi,



Arsitektur Informasi Pengelolaan Arsip Statis dalam AMP di ANRI

pengolahan, preservasi, hingga pemanfaatan arsip. Karena lingkungannya yang luas dan komprehensif, pada umumnya AMP dibangun dengan program jangka menengah melalui *multiyears* program dengan jangka waktu minimal 5 tahun. AMP juga merupakan upaya pengelolaan arsip statis yang modern dan *up to date*. Dengan demikian, teknologi informasi (IT) menjadi faktor determinan dalam penyelenggaraan AMP di lembaga kearsipan. Oleh karena itu, AMP terbagi menjadi *Archival Plan* dan *Archival Management System*.

Apa itu *Archival Plan*?

Archival Plan merupakan landasan dari AMP yang menitikberatkan pada aspek-aspek seperti penguatan Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan arsip statis, tata laksana (SOP), dan pengaturan skema seluruh khazanah arsip (*archives holding*) baik informasi dan fisiknya. Melalui *Archival Plan*, *grand design* pengelolaan arsip statis mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi, hingga pemanfaatan

arsip menjadi lebih terarah. *Archival Plan* juga memuat konsep arsitektur informasi yang digunakan sebagai *Blueprint* pengelolaan arsip statis.

Apa itu *Archival Management System*?

Archival Management System merupakan sebuah sistem informasi pengelolaan arsip statis yang mensinergikan kinerja antar fungsi unit kerja dalam sebuah sistem aplikasi yang komprehensif. *Archival Management System* bukan sekedar sebuah sistem aplikasi biasa, ia adalah *software* sekaligus *brainware* pengelolaan arsip statis di ANRI. *Archival Management System* memiliki fungsionalitas yang sesuai alur kerja pengelolaan arsip statis dari akuisisi, pengolahan, preservasi, hingga pemanfaatan arsip. Oleh karena itu, *Archival Management System* merupakan sistem aplikasi yang berbentuk modular yang menyesuaikan dengan fungsi-fungsi yang terdapat dalam proses pengelolaan arsip statis. *Archival Management System* tidak

hanya sekedar sistem aplikasi pada umumnya, tetapi juga menjadi sumber informasi utama dalam penyusunan strategi pengelolaan arsip statis. Hal ini disebabkan *Archival Management System* merupakan database sekaligus data center dari output kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan pemanfaatan arsip.

Implementasi *Archives Management Plan* di ANRI

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, AMP merupakan aspek fundamental dan tulang punggung pengelolaan arsip statis di sebuah lembaga kearsipan. Lingkup AMP mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi, hingga pemanfaatan arsip membuatnya menjadi sebuah sistem pengelolaan arsip statis yang komprehensif. Oleh karena itu, implementasi AMP di ANRI dilakukan di Deputi Bidang Konservasi Arsip yang terdiri dari Direktorat Akuisisi, Direktorat Pengolahan, Direktorat Preservasi, dan Direktorat Pemanfaatan.

Penerapan AMP di Direktorat Akuisisi

Sebagai unit kerja yang memiliki fungsi akuisisi arsip statis, Direktorat Akuisisi memegang kunci penting dalam bidang perluasan khasanah (*collection development*) yang dimiliki oleh ANRI. Penerapan *Archival Plan* di Direktorat Akuisisi menitikberatkan pada penguatan NSPK yang berkaitan dengan proses penilaian dan seleksi (*appraisal and selection*), penyerahan arsip (*transfer of archives*), penyusunan daftar arsip statis, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses akuisisi lainnya. *Archival Plan* di Direktorat Akuisisi juga memuat tata laksana unit kerja yang menjelaskan hubungan kerja antar SubDirektorat di dalam Direktorat Akuisisi, Direktorat Akuisisi dengan Direktorat lain di Deputi Bidang Konservasi Arsip, dan Direktorat Akuisisi dengan Pencipta Arsip (*Creating Agencies*).

Penerapan *Archival Management System* di Direktorat Akuisisi merupakan pengejawantahan *Archival Plan* dalam bentuk sistem aplikasi. Aplikasi ini menitikberatkan pada proses migrasi data dan informasi arsip hasil akuisisi (*incoming archives*) dari lembaga pencipta arsip ke ANRI berikut dengan dokumen pendukungnya. *Archival Management System* juga memuat database tentang sejarah lembaga pencipta arsip. Selain itu, *Archival Management System* juga memuat database Jadwal Retensi Arsip yang digunakan sebagai panduan penyusutan arsip di lembaga pencipta arsip.

Penerapan AMP di Direktorat Pengolahan

Fungsi Direktorat Pengolahan dalam pengelolaan arsip statis di ANRI meliputi kegiatan pengaturan dan deskripsi arsip (*arrangement and description*). Penerapan *Archival Plan* di Direktorat Pengolahan meliputi NSPK yang berkaitan dengan

pengaturan khazanah arsip statis (*arrangement in depository level*), sarana temu balik arsip statis (daftar, inventaris, dan guide arsip), standar deskripsi arsip (tekstual, audiovisual, dan kartografi), dan lain-lain.

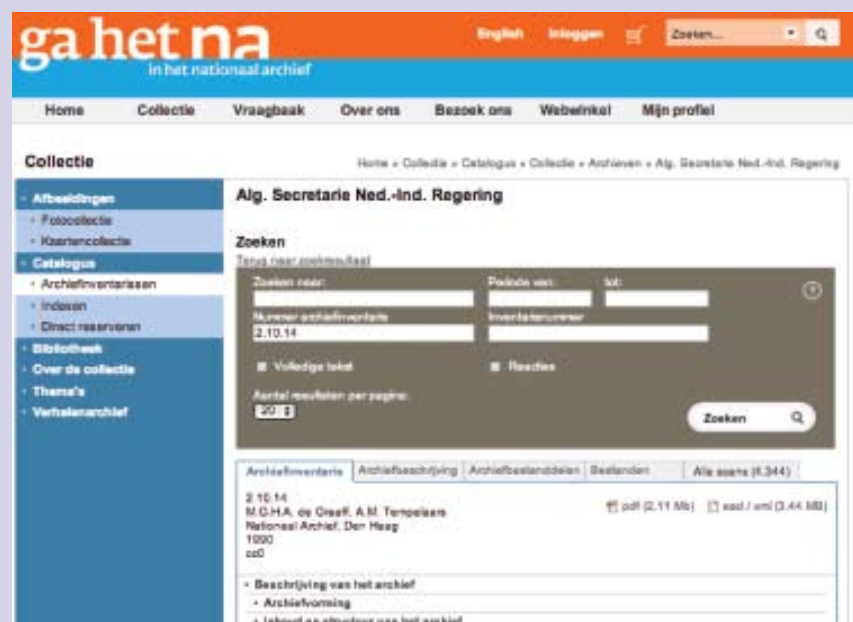
Penerapan *Archival Management System* di Direktorat Pengolahan memungkinkan kegiatan pengolahan informasi arsip (*arrangement and description*) dilakukan dalam sistem aplikasi yang menghasilkan sarana penemuan kembali (*finding aids*) dalam format digital yang dikehendaki seperti EAD-XML, RDF, DCMI, PDF, dan lain-lain. Dengan demikian pengolahan arsip tidak lagi dilakukan menggunakan *spreadsheet* seperti MS Word dan MS Excel. *Archival Management System* memungkinkan adanya control terhadap deskripsi arsip yang dilakukan oleh arsiparis di Direktorat Pengolahan secara kualitas dan kuantitas.

Penerapan AMP di Direktorat Preservasi

Direktorat Preservasi merupakan tulang punggung dari AMP terutama pada fungsi penyimpanan arsip

statis karena unit inilah yang berwenang mengetahui data tentang lokasi dan fisik arsip statis di ANRI. Penerapan *Archival Plan* di Direktorat Preservasi khususnya Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Konvensional dan Sub Direktorat Penyimpanan Arsip Media Baru menitikberatkan pada registrasi lokasi dan fisik arsip yang sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan. Selain itu, *Archival Plan* di Direktorat Preservasi juga mencakup standardisasi reproduksi, restorasi arsip statis, dan *quality control* oleh Laboratorium.

Archival Management System memuat informasi yang detail tentang lokasi arsip dari mulai nomor Depo, kolom, rak, boks, hingga berkas. *Archival Management System* juga memuat informasi tentang kondisi fisik arsip statis dalam rangka pelestarian dan penyediaan akses terhadap *user*. *Archival Management System* juga merekam informasi tentang arsip yang direproduksi. Hal ini membuat ANRI dapat memetakan jumlah khazanah yang dapat diakses publik khususnya dalam bentuk digital. *Archival Management System* terhubung



Situs ga.hetna.nl merupakan tampilan antarmuka bagi pengguna arsip (*user interface*) dari AMP yang diterapkan di Arsip Nasional Belanda (*Nationaal Archief*)



Seorang Pegawai di Direktorat Preservasi ANRI sedang mengembalikan boks arsip ke rak

dengan server atau bisa juga *cloud* guna menyimpan arsip hasil digitalisasi. *Archival Management System* memuat informasi tentang tingkat kerusakan arsip khususnya dari hasil analisa Laboratorium. Dengan demikian, arsip tersebut dapat mengalami proses perbaikan melalui restorasi.

Penerapan AMP di Direktorat Pemanfaatan

Sebagai unit kerja yang memiliki fungsi layanan publik (*public service*), penerapan AMP di Direktorat Pemanfaatan lebih banyak berkaitan dengan aksesibilitas arsip. Penerapan *Archival Plan* di Sub Direktorat Layanan Arsip menitikberatkan pada aspek pemanfaatan arsip oleh pengguna (*user*). Di sisi lain, *Archival Plan* di Sub Direktorat Penerbitan Naskah Sumber dan Pameran menitikberatkan pada publikasi khazanah arsip kepada publik.

Archival Management System di Direktorat Pemanfaatan berbentuk user interface (tampilan antarmuka untuk pengguna) berbentuk *website* khusus. Melalui *website* ini, pengguna dapat mengakses

sarana penemuan kembali (*finding aids*) yang pemutakhiran datanya dilakukan oleh Direktorat Pengolahan. *Archival Management System* di Direktorat Pemanfaatan memuat database pengguna arsip secara rinci, mulai dari data diri lengkap dan arsip yang pernah dipinjam. *Archival Management System* di Direktorat Pemanfaatan juga terhubung dengan sistem di Direktorat Preservasi yang memungkinkan pengguna arsip melakukan permintaan peminjaman arsip secara langsung melalui website tanpa harus mengisi formulir cetak karena permintaan dilakukan secara digital.

Archival Management System di Direktorat Pemanfaatan juga memuat informasi tentang penyajian arsip dengan tema-tema tertentu di *website*. Arsip ini tidak hanya hasil digitalisasi arsip kertas, tetapi juga arsip foto atau citra statik, film atau citra bergerak, dan rekaman suara. Khusus untuk arsip foto, penyajian dalam bentuk *image bank* merupakan sarana penyajian yang sudah dilakukan di berbagai negara maju. Arsip Nasional Inggris sudah mengunggah 25 ribu lembar

foto di situs web miliknya agar dapat diakses masyarakat. Arsip Nasional Belanda juga sudah mengunggah lebih dari 10 ribu lembar foto di *beeldbank* miliknya.

Archival Management System di Direktorat Pemanfaatan juga dapat memuat katalog perpustakaan di ruang layanan arsip. Hal ini berguna untuk memudahkan pemustaka untuk mengakses informasi mengenai buku-buku koleksi perpustakaan ANRI.

Sinergitas AMP dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Penerapan AMP di Deputi Bidang Konservasi ANRI dapat memberikan sumbangsih ke Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Penggunaan *Archival Management System* memungkinkan aplikasi ini mensuplai informasi arsip statis di ANRI dengan melakukan metadata *exchange* (pertukaran metadata) di JIKN. ANRI akan dapat mengirim digital *finding aids* dalam format yang *compatible* dengan JIKN. Dengan kata lain, AMP menjadi simpul jaringan dalam JIKN khususnya untuk arsip statis di ANRI.

Bangkit Mengejar Lembaga Kearsipan Negara-Negara Maju

Penerapan AMP sebenarnya telah dilakukan beberapa tahun lalu di lembaga kearsipan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Belanda, Australia, dan lain-lain. Namun demikian, hal ini belum terealisasi di Indonesia hingga saat ini. Melalui pelaksanaan program AMP, ANRI dapat menjadi lembaga kearsipan berkelas internasional. Selain itu, ANRI juga menjadi lembaga kearsipan yang mampu melestarikan dan menyediakan akses khazanah arsipnya kepada publik secara optimal melalui sebuah proses pengelolaan arsip yang terintegrasi dan terpadu.



Yuanita Utami :

TERBIT FAJAR

DI UFUK TIMUR JEPARA

“Jika dengan sebenarnya hendak memajukan peradaban, maka haruslah kecerdasan pikiran dan kecerdasan budi sama-sama dimajukan. *Habis Gelap Terbitlah Terang*”.

“No...!!” teriak Dika memanggil sahabat karibnya, Tono. Hari itu matahari tak begitu bersemangat memapar teriknya. Angin yang diembus dari balik pohon sawo depan sekolah menambah sejuk siang hari.

Dika tak mengulangi panggilannya, Tono tak juga bergeming dari posisi duduk dengan bacaan di tangannya. Diam, terpaku, matanya tak sekejappun berkedip. Ia menari di atas talian huruf-huruf.

Jepara, 1879.

Seorang putri lahir dari pasangan M.A Ngasirah dan Adipati Ario Sosrodiningrat, Kartini namanya, adik dari Sosrokartono.

Tanah Jepara yang masih basah disemai hujan membuat wangi bumi menyeruak ke langit-langit penciuman.

Kartono lekat-lekat memandangi adiknya, “biar dia jadi teman bermainku nanti,” bisiknya dalam hati, tersenyum penuh kebahagiaan melihat seorang adik ayu yang meringkuk dalam rengkuhan hangat ibundanya.

Benar saja, Kartini lekat sekali dengan kakak kesayangannya yang pintar dan gemar sekali membaca buku-buku besutan karya anak kumpeni. Tak pernah ketinggalan, Kartini pun turut mengenyam buku-buku yang dilahap oleh kakaknya. Mereka tumbuh menjadi putra-putri Jawa yang punya pemikiran modern.

Kakak beradik yang kerap bertarung pendapat, bertukar

informasi, sehingga keduanya menjadi pribumi yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata teman sebayanya.

Terlebih lagi, Kartini mendapatkan izin dari sang ayah untuk mengenyam pendidikan di *Europeesches Lagere School*, semakin terbuka pemikiran tentang pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, terutama kaum perempuan, kaum yang selama ini dinomorduakan oleh tatanan adat dan tradisi yang selama ini mengungkungnya.

Dia merasa iri dengan perempuan Eropa yang bisa bebas bersekolah sampai mereka suka, setinggi yang mereka mau. Mereka bebas mengungkapkan pemikiran mereka. Mereka tak bisa dikekang, tak juga diposisikan sebagaimana kaumnya di tanah Jawa ini.

Pendidikan yang dienyamnya

tidak menjadikan Kartini sebagai seorang yang kebarat-baratan dalam pergaulan, justru ia semakin sayang pada kaumnya, tetangganya yang perempuan, teman bermainnya yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah dan hanya “*nrimo*” apa yang suah digariskan ayah mereka kepadanya.

“Aku khawatir akan nasib kaumku di tanah Jawa ini, Kangmas..” ucap Kartini mengutarakan perasaannya kepada Kartono.

Kartono yang masyuk dengan bacaannya, beralih melirik Kartini, dan menekuri ucapan adik kandung semata wayangnya itu. Dia mengangguk.

Sungguh, dalam lubuk pikir Kartono, sudah lama bergelayut kecemasan itu. Terutama saat ayah mereka memadu ibundanya dengan Raden Adjeng Woerjan, gadis keturunan langsung Raja Madura. Betapa kakak beradik itu merintih dalam batin melihat nasib yang harus ditanggung oleh ibundanya. Kasih sayang ayahnya tak lagi bulat pada mereka bertiga.

“Apa yang akan kamu lakukan, Kartini?” tanya Kartono menanggapi kecemasan adik kesayangannya.

“Aku ingin membangun sekolah luar biasa untuk putri-putri Jawa Kangmas...” ujar Kartini penuh keyakinan.

Kartono langsung tersenyum mengembang, mengangguk, turut meyakinkan langkah Kartini, “Ya, kelak kamu harus mewujudkan impianmu, Kartini..”.

Masa “*pingit*” pun tiba. Kartini hanya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah sebatas usia 12 tahun.

Usia mula dimana semangatnya mulai menggebu-gebu namun harus terhenti lantaran tradisi membatasinya.

Meski demikian, tembok kamarnya tak turut membatasi pemikirannya, matanya terus berayun melintasi rentetan huruf dalam surat kabar, majalah, dan buku-buku bacaan kesayangannya. Berulang kali Kartini membacanya. Eropa yang diangan-angkannya, selalu dipeluk sebagai mimpi hidupnya.

Dahaganya akan ilmu pengetahuan sungguh tak terbandung. Keahliannya berbahasa Belanda pun semakin terasah, terlebih lagi seorang teman berkebangsaan Belanda yang dikenalnya, Rosa Abendanon, selalu setia menjadi teman korespondensinya.

Pada surat-surat yang dikirim Kartini kepada sahabatnya, Rosa Abendanon, Kartini selalu mengungkapkan pemikiran-pemikiran-nya akan kondisi sosial saat itu, tradisi Jawa yang membelit kaum wanitanya. Mereka harus mau di-“*pingit*” ketika beranjak remaja, kecil pun tak berilmu karena kesempatan belajar untuk kaumnya hampir tidak pernah ada, dialah Kartini yang beruntung itu yang sempat mengenyam bangku sekolah.

Jepara, 1903.

“Putriku, kemarin aku berjumpa dengan Singgih Djojo Adhiningrat, Adipati Rembang, aku bermaksud menikahkanmu dengannya, bersiaplah anakku...” ujar Adipati Ario Sosrodiningrat kepada putrinya, Kartini.

“Kamu akan berbahagia bersamanya, mendampinginya

memimpin Rembang,” lanjutnya semakin membuat Kartini tertunduk.

Kartini merasa asing dengan kehidupan yang akan dijalannya, dia pun asing akan Adipati Rembang yang akan menjadi suaminya. Yang dia tahu, dirinya bukanlah istri satu-satunya, melainkan istri ketiga.

“Ibunda, inikah nasib putrimu selanjutnya? Ananda harus siap menjadi madu Adipati Rembang. Hati menolak pun tak sanggup akan titah ayahanda. Biar nasibku dilindas adat. Biar aku akhirnya menjadi seperti madu dari Ibunda. Maafkan Ananda yang tak sanggup menolak takdir. Eropa, biarlah biar bayangan itu pergi sebagai asa yang tak kunjung sampai atau bahkan sekarang berakhir. Biarlah menjadi guru di Betawi terhempas bagaikan asap yang tak sampai menukik ke langit,” jerit Kartini dalam batinnya.

Dia seolah bicara pada ibundanya. Ternyata, nasibnya tak jauh berbeda dengan M.A. Ngasirah, ibundanya. Ibu Ngasirah istri pembuka untuk ayahnya, sedangkan dirinya istri ketiga untuk suaminya, kelak.

Perhelatan pun digelar untuk pernikahan Adipati Rembang dengan Kartini. Pernikahan berlandaskan adat dan tahta yang memilukan hati putri ayu Jepara itu.

“Biar...biarlah mimpiku untuk kaumku akan selalu kubawa..” Kartini meneguhkan harapannya. Dia tak putus berharap sekalipun dengan keadaannya sekarang sebagai seorang istri Bupati Rembang.

“...Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas

CERITA KITA

nama agama itu...” begitu bunyi surat Kartini, mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Nasib tak patut diratapi terus-menerus, dia tak harus kalah dengan kondisi yang membelenggunya.

Adipati Singgih Djojo Adhiningrat mengerti akan keinginan istrinya untuk mengajak kaum perempuan mengarah pada kemajuan. Maka ia mengizinkan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita yang letaknya di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang.

“Berkaryalah Kartini, aku suamimu, tak mau langkahmu surut, bangunlah kemajuan untuk kaummu. Mereka akan menjadi ibu yang pantas untuk putra-putrinya,” Begitu ujar suaminya.

Bagaikan kemarau panjang yang disapu hujan. Gagasan Kartini pun mendapat sambutan hangat. langkahnya didukung dengan fasilitas tempat yang disediakan untuk pembelajaran para wanita.

Kartini, ia tak berhenti merintis mimpi-mimpinya akan kehidupan yang lebih baik untuk para wanita Jawa. Sekolah wanita rintisannya pun ditanggapi positif oleh putri Jawa yang selama ini buta huruf, buta angka, dan buta pemikiran.

Rembang, 13 September 1904.

“Anakku, Soesalit Djojo Adhiningrat, ibunda telah melahirkanmu. Kamu anak lelakiku yang akan jadi penerus generasi ibunda dan ayahandamu...” bisiknya sembari menitikan air mata, melihat bayi kecil itu masih merah dibungkus kain jarik batik.

Kondisi kesehatan Kartini berangsur-angsur menurun. Lemah lunglai raganya.

Hanya empat hari dia bisa menatap buah hati yang telah dilahirkannya. Sang guru kaum wanita itu telah berkalang tanah.

Aku mati, aku tidak ada lagi. Aku masih memeluk mimpi-mimpi akan kemajuan kaumku. Aku tertawan tanah sekarang. Bunga-bunga kamboja mengharumkan pekuburanku. Apa yang aku tinggalkan untuk kaumku selain sedikit ilmu yang aku lahap dari bangku sekolah terdahulu.

Suratku.. Apa kabar surat-surat yang kutulis untuk para sahabat kulit putih? Semoga mereka menghimpunnya, bernurani untuk menjaganya atau menyusup ke relung pikir mereka sebagian asaku yang belum mau padam.

Entah. Kuharap kaumku bangkit dari duka lara dan kemiskinan ilmu, pun budi.

“No.. Kartono!” seru Dika, “Cepat jalan, ayuk kita pulang. Bus sekolah mau berangkat, Bro..” senggol Dika mengguncangkan fokus Kartono. Matanya terlalu lekat menatap lukisan Kartini dengan kedua saudara perempuannya.

Kartono bergegas melangkah keluar Museum Kartini. Kali ini, tujuan *study tour* mereka ke Rembang, tempat Kartini terakhir menghembuskan nafas.

“Kamu lagi mikirin apa, No? Memikirkan hubunganmu dengan R.A Kartini? Hahaha,,” tanya Dika sambil

meledak Kartono, yang mirip namanya dengan nama kakak R.A. Kartini.

Kartono pun tertawa menanggapi ucapan Dika, sahabatnya yang selalu mengusilinya.

“Dik, Dik, aku mau cerita serius nih, awalnya aku ngamuk sama ibuku, hari gini aku dikasih nama Kartono, jadul banget kan?”

Dika semakin tertawa mendengar pernyataan Kartono. Tak terasa, dia pun mengangguk, membenarkan, “Dasar kamu, No! Kamu mikirin juga ledekan anak-anak?” tawanya kembali.

“Rupanya ibuku terobsesi Dik sama sosok Kartini. Nama ibuku Dewi Martha Kartini, coba.. Sampe-sampe anaknya dikasih nama Kartono..” kata Tono lagi.

“Hahaha, aku kira begitu, No. Nenekmu juga tuh No, terobsesi juga sama sosok perempuan cerdas di Indonesia, lihat saja, Dewi kepanjangannya Dewi Sartika, Martha kepanjangannya Christina Martha Tiahahu, dan terakhir Kartini. Lengkap sudah..” Dika kembali berkelakar cerdas.

“Paling cepet deh kalo urusan nge-*bully* teman,” Kartono membalas kelakar sahabatnya itu dengan menenggelmakan topinya sampai menutupi mata.

Gelak tawa mereka pun pecah. Bus berlabel SMP Mekar Jaya melesat meninggalkan Rembang.

KERJA SAMA DENGAN BELANDA, ANRI SELENGGARAKAN WORKSHOP ON SYSTEMATIC DEPOT REGISTRATION



Peserta *Workshop on Systematic Depot Registration* menyimak materi yang disampaikan Prof. Charles Juergens

JAKARTA, ARSIP - Sebagai salah satu tindak lanjut kerja sama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan National Archives of the Netherland (NAN), pada 21 s.d 24 Januari 2014 ANRI melaksanakan “Workshop on Systematic Depot Registration” yang diikuti lima puluh satu orang pegawai ANRI. Workshop dilaksanakan di Ruang Serba Guna Soemartini, lantai 2, gedung A, ANRI dan dibuka secara langsung oleh Kepala ANRI yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Dr. Andi Kasman. Bertindak sebagai narasumber, guru besar dari Universitas Leiden, Prof. Charles Juergens.

Dalam sambutan Kepala yang disampaikannya, Andi mengungkapkan bahwa *workshop* ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di kedua lembaga pemerintahan pada umumnya, dan dalam upaya mendukung dan meningkatkan kegiatan konservasi arsip di ANRI pada khususnya. “Dalam *workshop* ini akan dibahas aspek-aspek dan relasi antarfungsi dalam *archival plan*, registrasi lokasi dan fisik arsip di depot penyimpanan secara sistematis, dan dilanjutkan dengan praktek lapangan di depot penyimpanan arsip,” paparnya.

Di awal penyampaian materinya,

Juergens pun menerangkan bahwa registrasi arsip di depot secara sistematis ini nantinya dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pendayagunaan arsip statis. Peserta pun diajak untuk berdiskusi dan praktik tentang hal-hal yang berkaitan dengan registrasi arsip di depot secara sistematis. (TK)

KEPALA ANRI : “PERANAN ARSIPARIS AKAN SEMAKIN STRATEGIS”



Kepala ANRI Mustari Irawan didampingi Kapusdiklat Kearsipan M. Imam Mulyantono berfoto bersama dengan peserta diklat

BOGOR, ARSIP - “Pada masa sekarang dan yang akan datang seorang arsiparis akan memainkan peranan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mustari Irawan saat menyampaikan materi Kebijakan Kearsipan Nasional pada Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Pusdiklat) ANRI Bogor.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa jabatan fungsional arsiparis bisa menjadi jabatan yang sangat menarik karena peranan seorang arsiparis semakin luas dan penting mengikuti perkembangan lingkungan, baik lingkungan global maupun lingkungan nasional. Secara global datangnya era ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015, dimana apabila AEC

tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN.

Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN. Peluang inilah yang harus ditangkap oleh para arsiparis untuk bisa bersaing dengan sumber daya manusia di negara ASEAN lainnya. Sebab kalau tidak menangkap peluang ini, maka bukan tidak mungkin SDM dari negara lainnya akan mengambil alih peran arsiparis yang ada di Indonesia.

Disisi lain reformasi birokrasi memberikan tantangan tersendiri bagi pegiat dibidang kearsipan termasuk arsiparis untuk lebih membenahi diri dengan terus meningkatkan

kompetensi di bidang kearsipan dalam mendukung penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and Good Governance*) dengan penyelenggaraan tata kelola kearsipan yang menunjang proses akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam semua aspek kehidupan, ujar Kepala ANRI di hadapan 30 orang peserta diklat yang akan berlangsung dari tanggal 17 s.d 27 Maret 2014.

Diklat yang dibuka oleh Kepala Pusdiklat Kearsipan M. Imam Mulyantono ini merupakan diklat perdana yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Kearsipan ANRI memasuki tahun anggaran 2014. Tahun ini (2014) Pusdiklat Kearsipan ANRI menyelenggarakan 15 kali diklat baik diklat fungsional maupun diklat teknis, disamping diklat kerjasama dengan instansi pusat dan daerah.(MI)

PUTARAN BERIKUTNYA SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT ESELON IA ANRI

JAKARTA, ARSIP - Seleksi terbuka Pejabat Eselon Ia Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali digelar. Kali ini masing-masing kandidat harus mempresentasikan makalahnya di depan Kepala ANRI, Para Pejabat Eselon I dan Para Pakar, Sabtu, 15 Maret 2014 di Ruang Rapat Pimpinan ANRI Gedung C lantai 4 yang di mulai tepat pukul 09:00 WIB.

Peserta diwajibkan menyampaikan presentasi dengan tema “Reformasi Penyelenggaraan Kearsipan Dalam Rangka Mewujudkan Good Government dan Mengangkat Marwah Bangsa”. Dengan judul presentasi yang berbeda-beda, mereka dengan semangat menyampaikan ide dan buah pikirannya untuk menjadikan ANRI yang lebih baik di hadapan Tim Penilai yang dipimpin langsung oleh Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA dan Penilai lainnya : Tasdik Kinanto, SH., M.Hum (Sekretaris Kementerian PAN RB), Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum (Sekretaris Utama ANRI), Dra. Dini Saraswati, MAP (Deputi Bidang



Tim penilai seleksi terbuka calon pejabat eselon Ia

IPSK ANRI), Dr. Andi Kasman (Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI), Dr. Djoko Sutrisno, M.Si (Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN RI), dan Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum (Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia).

Ketujuh kandidat yang mengikuti seleksi terbuka tersebut adalah Drs. Azmi, M.Si, Drs. Imam Gunarto, M.Hum, Drs. Kandar, MAP, Drs. M. Taufik, M.Si, Rudi Anton, SH., MH, Drs. Sumrahadi, MIMS, dan Widarno, SH., MH. (Fir)

ANRI BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA BANK INDONESIA

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memberikan Penghargaan bidang Kearsipan kepada Bank Indonesia atas kinerja yang sangat baik dalam hal pengalihmediaan dokumen pengaturan dan pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari upaya Bank Indonesia mengelola arsip secara profesional, akuntabel dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku” ucap Gubernur BI, Agus Martowardojo dalam



Kepala ANRI berikan penghargaan bidang kearsipan kepada Gubernur BI Agus Martowardojo

sambutannya di acara serah terima penghargaan tersebut.

Penghargaan yang diterima oleh Bank Indonesia ini merupakan penghargaan pertama yang diberikan oleh ANRI kepada lembaga negara terkait dengan proses alih media.

“Pengalihan media dokumen pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK ini merupakan suatu prestasi dalam bidang kearsipan dan Upaya BI adalah prestasi luar biasa. Bank-bank lain diharapkan dapat meniru BI ” ujar Mustari Irawan dalam sambutannya. (RICK)

CARI BUKTI PENETAPAN HARI JADI, PANSUS C DPRD KAB. MAJENE KUNJUNGI ANRI



Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK), Dra. Dini Saraswati, MAP menerima kunjungan Pansus C DPRD Kab. Majene

JAKARTA, ARSIP - Sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti dalam penetapan Hari Jadi Kab. Majene, tim Panitia Khusus (Pansus) grup C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Majene pada 17 Maret 2014 mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kunjungannya ini diterima oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK), Dra. Dini Saraswati, MAP dan didampingi Kasubdit Kearsipan Daerah II, Drs. Hilman Rosmana, Kasubdit Layanan Arsip, Mira Puspitarini, S.Sos. dan Kabag Humas, Dra. Listianingtyas M.

Dalam kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pansus Grup C, H.M. Yahya, tim penelusur

data penetapan hari jadi Kab. Majene mengemukakan beberapa hal berkaitan dengan data-data yang telah didapat untuk menetapkan hari jadi Kab. Majene. Asisten Daerah I Kab. Majene yang turut hadir pun berharap bahwa dalam khazanah arsip yang disimpan di ANRI dapat ditemukan bukti autentik yang dapat menjadi dasar penetapan hari jadi Kab. Majene.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Layanan Arsip ANRI menanggapi tentang penelusuran arsip hari jadi Kab. Majene. "Pada dasarnya, ANRI siap membantu untuk menelusur arsip yang memiliki keterkaitan dengan proses penetapan hari jadi Kab. Majene. Beberapa arsip yang sudah

kami dapatkan dapat dilihat di ruang baca ANRI. Namun, berdasarkan hasil pemaparan ibu sekretaris Tim tadi, kami akan menelusur dan meriset kembali arsip yang berkaitan dengan data-data tersebut," ungkap Mira.

Lebih lanjut Deputi IPSK memberikan apresiasi atas kesadaran tim pansus yang memiliki itikad untuk melibatkan arsip sebagai bukti autentik penetapan hari jadi. Dini pun dalam kesempatan ini menyampaikan pula bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan nasional khususnya berkaitan dengan pentingnya menyelenggarakan kearsipan di daerah dan peraturan daerah tentang kearsipan.(TK)

CALON PIMPINAN TINGGI PRATAMA ANRI LAKSANAKAN CAT DI BKN



Suasana tes kemampuan bidang melalui Computer Assited Test (CAT) untuk seleksi calon pimpinan tinggi pratama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

JAKARTA, ARSIP - Sebanyak delapan belas orang peserta seleksi calon pimpinan tinggi pratama di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 18 Maret 2014 mengikuti tahapan tes kemampuan bidang melalui *Computer Assited Test* (CAT) di gedung CAT Badan Kepegawaian Negara (BKN) lantai 2, jalan Letjen. Sutoyo nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur.

Rangkaian tes kemampuan bidang ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil BKN, Drs. Aris Windiyanto, M.Si. yang didampingi

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Zita Asih Suprastiwi, SH. Dalam sambutannya, Aris menyampaikan bahwa pelaksanaan tes CAT mencakup tes tentang wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan tes kemampuan bidang kearsipan. Dalam kesempatan yang sama, Zita mengemukakan bahwa rekrutmen ini dilaksanakan secara terbuka dan peserta seleksi terdiri dari enam belas orang dari lingkungan internal ANRI dan dua orang eksternal ANRI (satu orang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta satu orang

dari Kementerian Perumahan Rakyat). Sebelum mengakhiri sambutannya, Zita pun memberikan ucapan selamat melaksanakan tes kepada kedelapan belas orang peserta. Adapun jumlah soal yang harus dikerjakan berjumlah seratus soal dan harus diselesaikan selama enam puluh menit. (TK)

PENYERAHAN JRA BAWASLU DAN DKPP RI



Kiri-Kanan: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani berita acara serah terima arsip statis.

JAKARTA, ARSIP - Pesta demokrasi semakin dekat dan menjelang peristiwa penting tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI telah resmi memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) substantif dan fasilitatif. Artinya baik Bawaslu dan DKPP RI telah memiliki payung hukum dalam melakukan penyeleksian terhadap arsip-arsipnya. Bertempat di kantor Bawaslu, Jln. MH. Thamrin no 14, Jakarta Pusat, Mustari Irawan, Kepala Arsip Nasional RI, menyerahkan secara langsung JRA substantif dan fasilitatif kepada Sekertaris Jenderal Bawaslu RI, Gunawan Suswanto.

Pada kesempatan yang sama,

dilakukan serah terima arsip statis baik dari Bawaslu dan DKPP RI. Arsip hasil putusan penyelesaian sengketa pemilu dan arsip statis Bawaslu dipindahtangankan ke ANRI untuk disimpan sebagai memori kolektif bangsa.

Dalam sambutannya, Mustari Irawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu dan DKPP RI atas perhatian lebihnya pada penyelenggaraan kearsipan di masing-masing lembaga tersebut. Beliau menekankan makna dalam penyerahan arsip Bawaslu dan DKPP tersebut, Pelaksanaan terhadap pasal 48 dan pasal 53 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta sebuah pembelajaran politik bagi generasi

selanjutnya yang dapat dilihat melalui arsip. “Melalui arsip Bawaslu dan DKPP RI dapat diperoleh gambaran bagaimana demokrasi di Indonesia” ujar Mustari.

Senada dengan Kepala ANRI yang menjelaskan peran arsip dalam pembelajaran politik, Ketua Bawaslu melihat arsip sebagai harga diri lembaganya. “Sebagaimana dokumen dapat dipertanggungjawabkan itulah harga diri dari Bawaslu” tutur Muhammad, Ketua Bawaslu yang kemudian diamini oleh himbuan Ketua DKPP RI yang mengajak seluruh jajarannya untuk semakin tertib administrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. (ANN)

FORMULIR PENGAJUAN ARSIP KAA SEBAGAI MOW DIBAHAS FINAL



Suasana *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Nominasi Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai *Memory of The World* (MoW)

JAKARTA, ARSIP - Sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Nominasi Arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) sebagai *Memory of The World* (MoW) kembali digelar sebelum formulir pengajuan tersebut diajukan kepada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). FGD yang diselenggarakan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jalan Gatot Subroto Jakarta pada 21 Maret 2014 ini turut dihadiri pula oleh Kepala ANRI Mustari Irawan, MPA., Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Prof. Dr. Arief Rachman, M.Pd., Ketua Komite MoW Indonesia Prof. Dr. Bambang Subiyanto.

Sebelum FGD dimulai, Mustari menyampaikan harapannya bahwa dengan diajukannya arsip KAA sebagai MoW ini diharapkan menjadi salah satu media diseminasi arsip tentang diplomasi internasional. "Sejak tahun 2010, ketika KNIU mulai merancang pengajuan arsip KAA sebagai MoW, ANRI sudah melakukan beberapa persiapan di antaranya pelaksanaan rapat koordinasi, seminar, *workshop*, dan FGD yang turut menghadirkan beberapa pakar dan pihak yang terkait, "terangnya. Senada halnya dengan Arief dan Bambang yang berharap bahwa momen pengajuan arsip KAA sebagai MoW ini dapat kembali membangkitkan semangat

bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika.

FGD yang dipimpin oleh Direktur Preservasi ANRI, Drs. Imam Gunarto, M. Hum. menghasilkan beberapa masukan guna membahas final formulir pengajuan yang akan dikirimkan ke UNESCO pada 26 Maret 2014 ini. Sebelumnya, peserta FGD diajak untuk menyaksikan film tentang KAA yang secara khusus disiapkan ANRI sebagai lampiran pengajuan formulir arsip KAA sebagai MoW. (TK)

KEPALA ANRI BUKA SEMINAR PENGAMANAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA YANG TERSANGKUT PERKARA PIDANA (EXTRAORDINARY CRIME)

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) pada 26 Maret 2014 menggelar Seminar Nasional Kearsipan yang mengupas tema “Pengamanan Dokumen/Arsip Negara yang Tersangkut Perkara Pidana (*Extraordinary Crime*)” di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2, ANRI jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan. Seminar yang dibuka secara resmi oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan, MPA. pada pukul 09.00 ini terdiri dari tiga sesi dengan peserta dari berbagai unsur, di antaranya, aparaturnegara, organisasi profesi kearsipan, perbankan, praktisi hukum dan akademisi.

Dalam sambutan pembukaannya, Mustari menyampaikan bahwa kegiatan seminar yang diselenggarakan AAI ini sejalan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang membahas tentang organisasi profesi. “Melalui seminar ini kita bersama-sama membangun suatu konsepsi di antaranya tentang mekanisme dalam menangani penciptaan arsip yang bersifat strategis, agar digunakan oleh stakeholder sebagai bahan akuntabilitas dengan tetap menjaga keautentikannya,” tambah Mustari.

Pada sesi kesatu seminar ini menghadirkan pembicara Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ranu Miharja, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI Zita Asih Suprastiwi, Kepala Satgas Pengelolaan Barang Bukti KPK Andi Suharliis. Dalam sesi ini dibahas tentang Pengamanan Dokumen Negara dalam Proses Penanganan



Seminar Nasional Kearsipan “Penanganan Dokumen/Arsip Negara yang Tersangkut Perkara Pidana *Extraordinary Crime*”

Tindak Pidana Korupsi. Pada kesempatan ini pembicara dari KPK dan ANRI mengupas hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan terhadap kasus korupsi yang kerap kali melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti termasuk dokumen. Selama ini dalam melakukan penyitaan dokumen, KPK tetap bekerja sesuai dengan prosedur di antaranya dilaksanakannya penandatanganan berita acara penyitaan dokumen. Tetapi, ke depannya KPK akan melakukan kerja sama dengan ANRI tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan arsip/dokumen. Pada sesi ini Ranu pun mengemukakan bahwa para pesertav di sini yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dokumen ini jangan merasa takut dengan kewajiban menyimpan dokumen.

Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Anhar Gonggong, dan Pakar

Kearsipan Internasional Djoko Utomo, MA.. menjadi pembicara sesi kedua. Dalam kesempatan ini dibahas tentang Menjaga Dokumen/Arsip Negara untuk Memperkuat Kedaulatan Negara. Dalam pembahasan pun memetakan pula tentang jenis dokumen yang memiliki nilai strategis dan vital yang berperan untuk memperkuat kedaulatan negara. Sedangkan pada sesi ketiga dilaksanakan pembahasan materi seputar Transaksi Elektronik dan Pengamanannya dengan pembicara dari PPAK dan Mabes Polri. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dr. Muhammad Yusuf, SH., MH dan Fian Aruma Rafael dari Bareskrim Mabes Polri bertindak sebagai pembicara yang membahas pula seputar dokumen elektronik (digital) yang sering digunakan alat bukti yang keautentikannya memerlukan keahlian tersendiri untuk memuktikannya. (TK)

MOU ANRI DENGAN BMKG, UPAYA PENYELAMATAN ARSIP SEBAGAI MEMORI KOLEKTIF BANGSA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

JAKARTA, ARSIP - Tari Saman dari Nangroe Aceh Darusalam menambah semarak Rakornas BMKG 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada tanggal 2 April 2014. Rakornas yang mengambil tema “Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Otomatisasi Peralatan Sebagai Pondasi Peningkatan Layanan MKKuG”. Acara yang dihadiri oleh Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng, Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA bersama pejabat eselon 1 dan 2 dilingkungan ANRI, staf ahli dari Kementerian PU dan tamu undangan VIP dari berbagai kalangan serta tidak ketinggalan para peserta Rakornas BMKG di Balai 1 sampai 5 di seluruh Indonesia dan anggota Persatuan Dharma Wanita BMKG. Adapun kegiatan Rakornas tersebut berlangsung Penandatanganan MoU antara BMKG dengan ANRI tentang Penyelenggaraan Kearsipan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Dalam sambutannya Kepala ANRI menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan suatu langkah besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan sehingga diharapkan dengan terlaksananya kerjasama ini dapat membantu dalam penyelenggaraan tugas pokok kita selaku instansi publik dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada publik. Hal ini juga perlu dilakukan dalam upaya penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika serta dalam upaya penyelamatan arsip sebagai bahan



Penandatanganan MoU antara BMKG dengan ANRI tentang Penyelenggaraan Kearsipan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.

pertanggungjawaban nasional. Hal-hal tersebut di atas, baik secara langsung ataupun tidak langsung harus dapat kita pertanggungjawabkan baik secara riil dan materil kepada negara dan rakyat. Beliau mengingatkan bahwa di dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Pasal 3 mengamanatkan kepada kita selaku pelayan publik memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa dan negara terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di amanatkan oleh Undang-Undang kepada kita selaku instansi publik.

Kepala BMKG mengatakan bahwa, sebelumnya pada tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh, BMKG mendeteksi

gempa dan sebagainya dibutuhkan waktu 1 jam. Dalam waktu 5 tahun setelah tragedi tsunami Aceh BMKG dapat mendeteksi hanya dalam waktu 5 menit dan dalam 5 tahun mendatang sampai 2019, BMKG menargetkan layanan peringatan dini tsunami dari sebelumnya 5 menit menjadi 3 menit. Ada beberapa hal mengapa bencana berdampak sangat besar yaitu karena masyarakat tidak tahu kapan bencana terjadi, daya dukung alam yang rentan dan tidak ada sistem peringatan dini. Pada bagian sistem peringatan dini menjadi tugas BMKG untuk mempersiapkannya karena sangat berperan penting dalam evakuasi bencana. “Semakin cepat informasi disebarluaskan, semakin besar kemungkinan evakuasi berhasil dilakukan”, tambah beliau. (FIR)

HUT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KE-15, ANRI BERIKAN “KADO SPESIAL”

LAMPUNG, ARSIP - Senin 21 April 2014, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyerahkan “kado spesial” kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa Citra Kabupaten Lampung Timur dalam Arsip. Penyerahan Citra Daerah tersebut dilaksanakan di *Islamic Centre* Sukadana dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-15 Kabupaten Lampung Timur. Citra Daerah diserahkan oleh Kepala ANRI yang diwakili oleh Direktur Pengolahan Drs. Azmi, M.Si kepada Bupati Lampung Timur Erwin Arifin SH, MH.

Acara HUT Ke-15 Kabupaten Lampung Timur berlangsung meriah dan dihadiri oleh Perwakilan dari Provinsi Lampung, Bupati Mesuji, Kepala Satuan Kerja Perangkat



Penyerahan Citra Kabupaten Lampung Timur oleh Kepala ANRI yang diwakili oleh Direktur Pengolahan Drs. Azmi M.Si kepada Bupati Lampung Timur Erwin Arifin SH, MH

Daerah dan Camat se-Kabupaten Lampung Timur serta disaksikan oleh masyarakat sekitar Sukadana.

Lampung Timur merupakan

salah satu kabupaten baru di Provinsi Lampung. Wilayahnya merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1999. Kabupaten Lampung Timur terkenal dengan gajahnya yang dapat “bermain” bola. Di daerah ini juga terdapat Taman Nasional Way Kambas.

Wilayah berpenghasil lada itu, dikenal sebagai daerah tujuan transmigrasi sejak zaman kolonial Belanda. Oleh karenanya, banyak nama daerah di wilayah Lampung Timur menggunakan nama asal transmigran, seperti Pekalongan, Purbolinggo, dan lain-lain. (Agg)

PUSJIBANG KEARSIPAN ANRI SIAPKAN PEDOMAN RETENSI ARSIP SUBSTANTIF NASIONAL

JAKARTA, ARSIP - Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional RI tengah menggarap Pedoman Retensi Arsip Substantif Nasional. Dimulai dengan mengundang Kementerian terkait. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI menggelar Rapat Koordinasi Awal dengan tajuk “Penyusunan Draf Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pedoman Retensi Arsip”. Bertempat di RSG Soemartini Arsip Nasional RI, acara ini dibuka oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Dini Saraswati.

Dalam sambutannya Dini menyampaikan apresiasi pertemuan

awal ini dan berharap titik awal ini dapat menghasilkan sebuah Pedoman Retensi Arsip Substantif yang dapat dipakai secara nasional yang akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi negara.

Kegiatan yang dihadiri oleh 50 orang peserta dari Kementerian/Lembaga terkait ini kemudian langsung dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Rudi Anton, sebagai narasumber. Mengawali paparannya Rudi Anton menyampaikan mengenai pentingnya arsip terutama sebagai barang bukti dan konsekuensi dari lahirnya UU

KIP. Rudi juga menyampaikan bahwa Pedoman Retensi Arsip Substantif yang dalam 2 tahun kedepan menjadi program kerja merupakan sebuah “hutang” yang belum terbayar selama 35 tahun, tepatnya terhitung sejak UU No 7 Tahun 1979 disahkan.

Masih dalam paparannya Rudi juga menginformasikan bahwa telah ada koordinasi yang baik antara ANRI, Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri mengenai tata naskah dinas. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik tidak terdapat kerancuan lagi dan dengan adanya Pedoman Retensi Arsip Substantif ini akan ada pengelolaan arsip yang sistemik. (ANN)

TATA KELOLA ARSIP, BNI PEROLEH AKREDITASI “ISTIMEWA”

JAKARTA, ARSIP - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperoleh akreditasi “A” (Istimewa) dalam penyelenggaraan kearsipan. Akreditasi tertinggi itu dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui proses tahapan penilaian yang ketat. Dengan pengelolaan arsip yang baik, data-data yang dimiliki BNI dapat tersimpan dengan Aman

Sertifikat akreditasi disampaikan langsung oleh Kepala ANRI Mustari Irawan kepada Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo di gedung BNI, Sudirman, Jakarta. “Penghargaan ini adalah penghargaan yang tertinggi yang kami berikan kepada sebuah perbankan nasional” ungkap Mustari, 5 Mei 2014.

Gatot mengungkapkan bahwa arsip itu sesuatu yang *simple*, tapi sangat krusial. Keberadaan arsip sangat dibutuhkan kalau ada ricuh orang atau ada hal-hal lain diluar dugaan. Dengan tata kelola arsip yang baik akan memudahkan urusan perusahaan. “*simple thing but very-very important*”, ujarnya.

Gatot mendorong kepada divisi pengelolaan arsip di BNI untuk terus meningkatkan kinerjanya di bidang kearsipan. “Akreditasi ini bukanlah *the end of the story, only the begining of the story*. Dimana kita dari tahun ke tahun harus terus melakukan perbaikan-perbaikan, mengikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi di industri perbankan”, tambahnya.

Kepala ANRI juga mengucapkan selamat kepada BNI yang telah memperoleh akreditasi A dalam pengelolaan arsip dan dapat diikuti oleh industri perbankan lain. “Mudah-



Penyerahan Sertifikat Akreditasi di Bidang Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.



Suasana Penyerahan Sertifikat Akreditasi

mudahan saya berharap bahwa seluruh perbankan, baik yang pemerintah maupun swasta, bisa mengikuti BNI untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap masalah kearsipan”, lanjutnya.

Adapun sejumlah langkah yang telah dilakukan BNI dalam pengelolaan arsip yang maksimal, yaitu, pertama, membuat *record centre* yang modern

di Cikupa, Tangerang dengan luas lahan 3 hektar dan luas bangunan 1,2 hektar. Record Centre ini dapat menampung 315.000 kotak arsip, untuk melayani BNI se-Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten.

Kedua, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia kearsipan baik melalui sosialisasi maupun dengan mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop, uji kompetensi, dan sertifikasi. Sebanyak 36 pegawai telah memiliki sertifikasi bidang kearsipan. Ketiga, membuat pedoman perusahaan untuk kearsipan agar sesuai dengan undang-undang dan kaidah-kaidah kearsipan.(sa)

KUNJUNGAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT LAKSAMANA TNI DR. MARSETIO KE ANRI



Foto bersama Kepala Staf Angkatan Laut dan Sekretaris Utama ANRI beserta jajarannya

JAKARTA, ARSIP - Dalam rangka menghimpun informasi sejarah mengenai Angkatan Laut, pada senin 5 mei 2014 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio untuk melaksanakan wawancara sejarah lisan. Kehadiran Kasal yang didampingi para Pejabat Teras Mabas TNI AL diterima secara resmi oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni didampingi Direktur Akuisisi, dan Kepala Biro Perencanaan. Laksamana TNI Dr. Marsetio menyambut baik kegiatan wawancara sejarah lisan dan berharap



Kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut ke Layanan Arsip ANRI

dapat dilanjutkan dengan wawancara berikutnya. Dalam kesempatan tersebut Kasal berkenan memberikan beberapa VCD dan buku buku yang berkaitan dengan tugas Angkatan

Laut dalam menjaga wilayah laut nusantara. Acara kunjungan diakhiri dengan tinjauan ke Ruang Layanan Peminjaman Arsip dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (Ning)

ANRI BERI APRESIASI WORKSHOP AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK DAN ARSIP HASIL DIGITALISASI



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Membuka Acara Workshop Kearsipan Asean Autentikasi Arsip elektronik dan Arsip Hasil Digitalisasi

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) pada 20 Mei 2014 menggelar Workshop Kearsipan ASEAN Autentikasi Arsip Elektronik dan Arsip Hasil Digitalisasi di Ruang Mawar, Balai Kartini. Seminar yang menghadirkan pembicara dari akademisi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, dan pakar kearsipan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Dr. Andi Kasman, SE., MM.

Dalam sambutannya, Andi menyampaikan bahwa workshop ini merupakan salah satu wujud peran masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. "Melalui forum ini kita

bisa bersama-sama memberikan kontribusi berupa masukan yang di antaranya berkaitan dengan penggunaan arsip elektronik dan hasil digitalisasi menjadi alat bukti yang sah di pengadilan dan hak-hak keperdataan masyarakat. ANRI pun memberikan apresiasi yang tinggi pada acara ini," jelas Andi.

Workshop yang diprakarsai AAI ini menjadi suatu hal yang penting mengingat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan dokumen/arsip elektronik banyak digunakan. Banyak pihak pula yang sudah dan mulai mengalihmediakan/digitalisasi dokumen/arsip dari media kertas ke media digital. Hasil digitalisasi dokumen/arsip tersebut termasuk pada kategori arsip elektronik. Arsip hasil digitalisasi dan arsip elektronik ini kadang kala memunculkan

keraguan berkaitan dengan keabsahan/keautentikannya.

Adapun penyampaian materi workshop dibagi menjadi dua bagian, pada sesi pertama dibahas tentang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip di Era Digital serta Autentikasi Informasi dan Fisik Arsip. Pada sesi kedua dibahas materi Alih Media dan Autentikasi Arsip serta Aspek Legal Arsip Elektronik: Studi Kasus Autentikasi Arsip. Workshop berlangsung sampai dengan pukul 15.00 WIB diikuti 120 peserta dari berbagai unsur, di antaranya dari lembaga negara, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi politik dan organisasi masyarakat. (TK)

SELARASKAN ARAH DAN PRIORITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PEMERINTAHAN DAERAH, ANRI GELAR RAKORNAS BIDANG KEARSIPAN



Kepala ANRI memberikan sambutan dan membuka acara Rakornas Bidang Kearsipan di Swissbell Hotel Mangga Besar, Jakarta.

JAKARTA, ARSIP - Direktorat Kearsipan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kearsipan yang dibuka pada 20 Mei 2014 pukul 19.00 WIB di Swissbell Hotel Mangga Besar, Jalan Kartini Raya Nomor 57, Mangga Besar, Jakarta Utara. Rakornas ini dilaksanakan guna menyelaraskan pemahaman mengenai arah, ruang gerak, dan prioritas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah pada RPJM 2015-2019 dan diikuti perwakilan lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia sejumlah 400 orang.

Acara rakornas yang dibuka oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan, MPA. ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Kearsipan ke-43 yang jatuh tepat pada 18 Mei 2104. Dalam sambutan pembukaannya, Mustari mengungkapkan bahwa rakornas ini menjadi salah satu wujud kontribusi kearsipan bagi pemerintahan

daerah dan masyarakat. “Ada hal yang harus diperhatikan dalam rangka pemerintahan daerah yang otonom, bagaimana pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sudahkah capaian pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya. Selain pembukaan acara rakornas dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ANRI dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang. Rakornas dilaksanakan terhitung tanggal 20 Mei s.d 21 Mei 2014.

Dalam kesempatan ini pun, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Dr. Andi Kasman, SE.,MM berkesempatan memaparkan materi tentang Rencana Aksi Pembinaan Kearsipan Daerah yang di antaranya membahas penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan dan lembaga kearsipan pada K/L di tingkat Pusat dan Daerah terutama di

daerah wilayah perbatasan negara, penguatan fungsi dan peranan unit dan lembaga kearsipan pada K/L di tingkat Pusat dan Daerah melalui pembangunan records center dan depot arsip statis, pengembangan sumber daya manusia kearsipan terutama arsiparis baik secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan Direktur Kearsipan Daerah, Widarno, SH, MH, dalam pemaparan materinya menekankan bahwa mengakhiri RPJM 2010-2014, setiap pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah harus bisa mengevaluasi capaian kerjanya.

Adapun hasil yang diharapkan melalui rakornas ini di antaranya adalah dihasilkannya rekomendasi arah, ruang gerak, dan prioritas penyelenggaraan kearsipan bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk RPJM 2015-2019 yang dapat menjadi dasar dan acuan lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun RPJMD 2015-2019. (TK)

RIDWAN KAMIL: DIORAMA DI ANRI INSPIRATIF!



Kunjungan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ke Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, ANRI.

JAKARTA, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, MPA beserta jajaran pada 21 Mei 2014 menerima kunjungan kerja Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil yang sekaligus pula melaksanakan wawancara sejarah lisan dengan tim wawancara sejarah lisan ANRI. Dalam kunjungan pertama kalinya ke ANRI, pria yang akrab disapa Kang Emil ini berkesempatan mengunjungi Ruang Baca ANRI dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa.

Ketika berada di Ruang Baca ANRI, Kang Emil terlihat begitu antusias saat mengamati berbagai khazanah arsip ANRI yang berkaitan dengan Kota Bandung. Beberapa khazanah arsip tersebut antara lain blue print Gedung Sate, pidato Presiden Soekarno saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Kota Bandung, peta



Tim Sejarah Lisan ANRI sedang mewawancarai Wali Kota Bandung Ridwan Kamil

kota Bandung pada abad ke-17, foto Bandung tempo dulu dan lain-lain.

Usai mengunjungi Ruang Baca, Kang Emil kemudian berkesempatan menelusuri delapan hall di Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Decak kagum Kang Emil nampak jelas ketika

beliau mengamati berbagai muatan materi yang berada di diorama sampai akhirnya berada di hall terakhir. "Diorama terbaik yang pernah saya kunjungi, inspiratif, "tutup Kang Emil saat menyampaikan pesan dan kesannya mengunjungi diorama. (TK)

21 INSTANSI TUNAIKAN PASAL 53 AYAT (1) UU NOMOR 43 TAHUN 2009

JAKARTA, ARSIP - Euforia Peringatan Hari Kearsipan ke-43 tahun ini dimeriahkan dengan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), salah satu yang menjadi kebanggaan, 21 lembaga baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat dengan penuh kesadaran menyerahkan arsip statisnya.

Prosesi yang dikemas dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Akuisi Instansi Strategis tersebut berlangsung pada 20 Mei 2014 pukul 09.00 WIB di Amaroosa Hotel yang berlokasi di jalan Pangeran Antasari No 9a-b Jakarta. Dalam momentum tersebut secara berurutan Kementerian Kehutanan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Perumahan Rakyat RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Badan Pelaksana BPLS, Arsip Nasional RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mahkamah Konstitusi RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), PT. Pelindo III, PT. Askes (BPJS), PT. Angkasa Pura I dan Sdri. Rina Rakhmawati, memindah tangankan arsip statisnya kepada Arsip Nasional RI.



Kepala ANRI Mustari Irawan membuka acara Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Instansi Strategis dan Serah Terima Arsip Lembaga Negara dan Perusahaan



Suasana diskusi panel rakor akuisisi

Dalam sambutannya, Kepala Arsip Nasional RI, Mustari Irawan mengakui pada acara inilah jumlah instansi terbanyak yang secara simultan menyerahkan arsipnya ke ANRI. "Hari ini banyak kementerian dan lembaga yang menyerahkan arsip ke ANRI, yang terbanyak, barangkali bisa masuk rekor MURI" ujar Mustari. Selanjutnya ditekankan pula bahwa yang terpenting dalam penyerahan arsip bukanlah

kuantitasnya melainkan kesadaran dari Kementerian/Lembaga bahkan Masyarakat untuk melestarikan arsip sebagaimana yang dilakukan oleh Rina Rakhmawati, mahasiswi S2 Universitas Gajah Mada yang dengan sukarela menyerahkan arsip akta tanah ke ANRI.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili instansi penyerah arsip, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan DKPP RI, Gunawan Suswantoro, menghimbau instansi-instansi yang baru berdiri untuk menyelamatkan arsipnya. Hal senada juga disampaikan oleh Hayati dari PT. Pelindo III yang menghimbau BUMN lainnya untuk menyerahkan arsip statis untuk menjaga memori instansi. (aNN)

PENGELOLAAN ARSIP BAIK, OPINI WTP DI “TANGAN”



Sekretaris Utama ANRI memberikan arahan kepada para peserta sosialisasi peraturan kearsipan

PANGKAL PINANG, ARSIP - Hotel Santika, Pangkal pinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadi tempat bagi 100 peserta dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perguruan Tinggi se-Provinsi Kepulauan Babel yang menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada 4 Juni 2014. Kegiatan yang dibuka Staf Ahli Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup provinsi Babel, Drs. Hasanudin, MM turut dihadiri pula oleh Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Babel beserta jajaran pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI.

Hasanudin yang hadir mewakili Gubernur Kepulauan Babel dalam sambutannya mengharapkan agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap tujuan, pengertian, asas dan tata cara penyelenggaraan kearsipan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik dan berwibawa sehingga arsip yang tercipta dapat menjadi barang bukti, sarana informasi, pengambilan kebijakan serta bahan pembelajaran.

Sedangkan dalam arahannya, Gina mengingatkan agar seluruh pengelola dan pencipta arsip dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga arsip yang diciptakan dapat terpercaya dan dapat digunakan untuk pertanggungjawaban nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan yang

berlaku. “Dengan pengelolaan arsip yang baik maka akan mendukung dan memudahkan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelas Gina.

Gina pun mengingatkan bahwa di akhir masa pemerintahan kabinet pembangunan II serta masa peralihan ke pemerintahan yang baru harus lebih tercerminkan sistem pengelolaan kearsipan yang baik agar sejarah peralihan transisi pemerintahan dapat tercipta dengan baik dan tidak tercecer. “Oleh karena itu sudah tidak ada lagi arsip yang di musnakan tanpa prosedur dan pengelolaan arsip tanpa sistem/pedoman tata keola kearsipan yang berlaku, sehingga sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak tercecer, “tegasnya. (Fir)

EMPAT BUMN SUSUN INSTRUMEN SIKD



Deputi Bid. Pembinaan Kearsipan Dr. H. Andi Kasman, SE., MM. saat memberikan arahan dalam acara penyusunan dan pembahasan instrumen SIKD bagi empat BUMN

JAKARTA, ARSIP - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) telah lama dibangun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai sarana pengelolaan arsip dinamis. ANRI dalam hal ini Direktorat Kearsipan Pusat melaksanakan penyusunan dan pembahasan instrumen pendukung demi terlaksananya penerapan SIKD tersebut. Kali ini pembahasan dilaksanakan dengan empat Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), PT. Pos Indonesia (Persero), Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Semarang, dan PTPN XIV Makassar. Acara dilaksanakan selama tiga hari mulai 5 s.d. 7 Juni 2014 di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.



Direktur Kearsipan Pusat, Drs. M Taufik, M.Si memberikan sambutan dalam acara penyusunan dan pembahasan instrumen SIKD bagi empat BUMN

Pembukaan acara ini dimulai dengan sambutan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Dr. H. Andi Kasman, SE., MM. dan dilanjutkan pemaparan materi terkait dengan kebijakan kearsipan nasional serta kebijakan yang berkaitan dengan SIKD. Pembahasan dan penyusunan intrumen SIKD dilakukan oleh masing-

masing tim dari empat BUMN dengan tim dari ANRI. Adapun empat instrumen yang harus ada untuk penerapan SIKD adalah tata naskah dinas/perusahaan, pola klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta klasifikasi keamanan dan akses arsip. Empat instrumen tersebut dibahas dan disusun guna terlaksananya implementasi SIKD di tiap BUMN yang mengikuti acara ini.

Acara ditutup oleh Direktur Kearsipan Pusat, Drs. M Taufik, M.Si. yang dalam sambutan penutupannya di antaranya menyatakan dalam rangka pembinaan kearsipan, ANRI akan membimbing secara teknis dan mengawal implementasi SIKD guna pengelolaan arsip yang berujung pada pelestarian arsip statis. (Spy)

ANRI TURUT BERPARTISIPASI PADA PPKI 2014

BATAM, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) turut berpartisipasi dalam Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) tahun 2014 yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono. PPKI ini diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nasional ke-25 di Batam, kepulauan Riau. Adapun partisipasi yang diberikan ANRI dalam PPKI tahun 2014 yang mengusung tema Kreativitas dalam Harmoni ini berupa keikutsertaan pameran kelembagaan ANRI dengan materi antara lain pelayanan publik di lingkungan



Wakil Gubernur Kepulauan Riau Dr. H.M. Surya Respartiono mengunjungi stan pameran kelembagaan ANRI

ANRI, virtual tour Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, *display* beberapa arsip yang berada di Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, pemutaran film dokumenter dan restorasi arsip

dengan menggunakan cara *sizing* dan enkapsulasi.

Pada kesempatan ini banyak pengunjung yang begitu antusias dengan materi yang ditampilkan, terutama dalam bentuk virtual tour, film dokumenter dan restorasi arsip. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mencoba enkapsulasi dan meminta pelayanan enkapsulasi gratis seperti enkapsulasi Kartu Tanda Penduduk. Selain itu, kuis tebak gambar dengan menggunakan aplikasi QR code yang tersaji di stand pameran kelembagaan ANRI menambah antusias publik untuk mengunjungi stand pameran kelembagaan ANRI. (TK)

ANRI TEKEN KERJA SAMA DENGAN ARSIP NASIONAL AUSTRALIA

JAKARTA, ARSIP - Disaksikan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty pada 17 Juni 2014 Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan, MPA dan Kepala Arsip Nasional Australia David Fricker menandatangani Nota Kesepahaman dan Program Eksekutif periode Juni 2014 – Desember 2015. Acara penandatanganan dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan lantai 4 gedung C, ANRI.

Usai acara penandatanganan Greg menyampaikan sambutan singkatnya yang mengungkapkan bahwa kerja sama yang dibangun antara Indonesia dengan Australia dalam bidang kearsipan ini akan memberikan manfaat pada masa mendatang. Senada juga halnya dengan yang disampaikan Fricker dan Mustari bahwa kerja sama ini akan



Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Program Eksekutif oleh Kepala Arsip Nasional Australia David Fricker dan Kepala ANRI Mustari Irawan disaksikan oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty

memberikan manfaat besar dalam bidang kearsipan.

Adapun ruang lingkup MoU antara ANRI dengan Arsip Nasional Australia di antaranya pertukaran kemampuan dan pengalaman di bidang preservasi

digital dan penggunaan teknologi online, dukungan non material untuk proses aplikasi ke universitas di Australia untuk pengembangan profesional di bidang kearsipan. (TK)

ANRI “BERGANDENGAN TANGAN” DENGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

JAKARTA, ARSIP - Pada 19 Juni 2014 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) resmi “bergandengan tangan” dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama oleh Kepala ANRI Mustari Irawan, MPA dan Kepala Perpusnas Dra. Sri Sularsih, M.Si. Kesepahaman bersama antara ANRI dengan Perpusnas yang ditandatangani di Ruang Sidang Perpusnas, jalan Salemba Raya nomor 28A ini mencakup koordinasi pembinaan, penyelamatan dan pelestarian di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam sambutan yang disampaikan usai acara penandatanganan Mustari menyampaikan bahwa bidang kearsipan dan perpustakaan ini seperti halnya saudara kandung, dua-duanya berkaitan dengan informasi. “Bahkan, jika kita lihat di daerah, secara institusi hanya ada tiga yang berdiri sendiri-sendiri antara kearsipan dan perpustakaan. Jadi kesamaan dan



Kepala ANRI Mustari Irawan dan Kepala Perpusnas Sri Sularsih berjabat tangan usai menandatangani kesepahaman bersama

kesejajaran program di daerah dapat dikoordinasikan, apalagi diperkuat dengan adanya kesepahaman bersama ini,” jelas Mustari. Demikian pula halnya disampaikan Sri Sularsih bahwa dengan adanya kesepahaman

bersama ini, antar lembaga dapat saling berbagi dan saling melengkapi. “Kita juga dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki tiap lembaga agar publik dan masyarakat bisa ikut merasakannya,” ungkap Sri. (TK)

ANRI SERAHKAN APLIKASI SIKD KE KEMENTERIAN PP DAN PA

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK) Dra. Dini Saraswati, MAP menyerahkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Dr. Ir. Sulikanti Agusni, M. Sc. Penyerahan aplikasi SIKD ini dilaksanakan pada 26 Juni 2014 di kantor Kementerian PP dan PA, jalan Medan Merdeka Barat nomor 15, Jakarta. Dalam kesempatan ini, turut hadir pula Kepala Biro Umum Kementerian PP dan PA dan Kasubdit Kearsipan Pusat I ANRI Drs. Tato Pujiarto.

Dalam sambutannya, Sulikanti menyampaikan bahwa kesempatan



Deputi Bid. IPSK ANRI Dini Saraswati (kiri) menyerahkan aplikasi SIKD kepada Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PP dan PA Sulikanti Agusni (kanan)

ini harus dimanfaatkan oleh rekan-rekan Kementerian PP dan PA untuk belajar pengelolaan arsip yang lebih baik lagi. “Apalagi sebelumnya sudah ada bimbingan teknisnya terlebih dahulu tentang kearsipan dinamis,

mudah-mudahan rekan-rekan dapat menerapkannya dalam rutinitas perkantoran sehari-hari. Dengan demikian, jika ke depannya kita membutuhkan data-data masa lalu kita juga tidak akan kesulitan mencarinya kalau mengelola arsipnya baik,” tegas Sulikanti. Senada dengan hal tersebut, Dini pun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan ANRI dalam pembinaan kearsipan di lingkungan kementerian/ lembaga. Beliau berharap agar aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan nantinya dapat memberikan dukungan dalam akses arsip dinamis bagi masyarakat jika telah dihubungkan dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). (TK)

ANRI PERTAHANKAN PREDIKAT OPINI WTP TAHUN 2013 DARI BPK RI

JAKARTA, ARSIP - 20 Juni 2014 Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan hasil pemeriksaan laporan keuangan 37 kementerian/ lembaga tahun 2013 atas kinerja keuangan entitas negara di Auditorium Tower BPK RI Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.

Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II serta para Kepala LPNK beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini Kepala Arsip Nasional RI (ANRI) Mustari Irawan di dampingi oleh Plh. Sekretaris Utama Syaifuddin dan Kepala Bagian Keuangan yg mewakili Inspektorat Kahim Sunjaya.

Dalam sambutannya anggota III BPK Agus Joko Pramono, menyebutkan terdapat lima kementerian/ lembaga mencapai peningkatan opini dan lima kementerian/ lembaga yang mengalami penurunan capaian opini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 2013 BPK kepada 37 kementerian/ lembaga. Sementara itu hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013, ANRI untuk keenam kalinya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Agus, pelaksanaan pemeriksaan keuangan BPK dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yaitu: pertama, kesesuaian laporan keuangan dgn standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP. Ketiga, efektifitas sistem pengendalian intern. Keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Agus menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan atas 37 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK) 2013 BPK memberikan opini



Wakil Ketua BPK memberikan selamat kepada Kepala ANRI atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 26 kementerian/ lembaga. Dengan banyak entitas yang memperoleh opini WTP menunjukkan sebagian besar kementerian/ lembaga bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparaturnegara, riset dan teknologi telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan harus terus dijaga.

Beliau juga mengingatkan bahwa opini WTP yang diberikan tidak menjamin kementerian/ lembaga bebas dari penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara ataupun praktek KKN dan tidak ada jaminan juga bahwa tahun yang akan datang akan mendapat opini WTP kembali. Itu bisa terjadi jika dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI terungkap temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Permasalahan yang terkait dengan kelemahan SPI utamanya adalah ketidaktertiban terutama dalam pengelolaan aset tetap dan bantuan sosial.

Sebagai contoh masalah yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan. Antara lain BPK masih menemukan hibah yang belum diajukan pengesahan ke Kementerian Keuangan, kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan belanja modal, dan penyimpangan perjalanan dinas. Di samping itu, BPK juga menemukan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang/ jasa, antara lain kelebihan pembayaran, pemahalan harga, belanja fiktif, denda belum dipungut dari rekanan dan pertanggungjawaban tidak akuntabel (tidak ada/ lengkap/ sesuai ketentuan).

Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri mengatakan mengelola keuangan negara bukan hal mudah namun ada aturan dan rasa keadilan serta kepatutan yang harus dipenuhi. Laporan BPK RI tersebut menekankan penggunaan anggaran dari masing-masing kementerian/ lembaga. Selain itu laporan tersebut juga melihat bagaimana kementerian/ lembaga mengelola aset, mencatat pendapatan dan pengeluarannya. (FIR)

JASA RAHARJA TERIMA APLIKASI SIKD DARI ANRI



Deputi Bid. Pembinaan Kearsipan ANRI Dr. Andi Kasman (kiri) menyerahkan aplikasi SIKD kepada Dir. Manajemen Risiko dan TI PT. Jasa Raharja (Persero) M. Wahyu Wibowo

JAKARTA, ARSIP - PT. Jasa Raharja (Persero) yang dalam hal ini diwakili Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi M. Wahyu Wibowo menerima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang diserahkan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr. H. Andi Kasman pada 27 Juni 2014. Serah terima aplikasi SIKD ini dilaksanakan di kantor pusat PT. Jasa Raharja (Persero), jalan HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelum pelaksanaan serah

terima aplikasi SIKD di PT. Jasa Raharja (Persero) ini, ANRI telah melakukan survey dan pembahasan instrumen SIKD bersama pihak PT. Jasa Raharja sebagai salah satu bagian pembinaan kearsipan di instansi tingkat pusat.

Dalam sambutannya, M. Wahyu mengungkapkan bahwa arsip ini merupakan aset informasi yang autentik sehingga pengelolaannya pun harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. "Semoga dengan telah diterimanya aplikasi SIKD ini dapat menjadi salah satu pendukung dalam penyempurnaan

penerapan kearsipan secara elektronik di lingkungan Jasa Raharja," jelas Wahyu. Lebih lanjut Andi pun menjelaskan bahwa pengelolaan arsip dinamis ini amat erat kaitannya dengan era keterbukaan informasi publik. "Karena arsip ini sangat memegang peranan dalam akuntabilitas kinerja kita," tambah Andi. Beliau pun berharap bahwa kegiatan ini menjadi salah satu ajang memperpanjang kemitraan ANRI dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang sudah terbangun sebelumnya. (TK)

ANRI RAIH PELAYANAN PUBLIK TERBAIK VERSI OMBUDSMAN



Ruang Layanan Arsip

JAKARTA, ARSIP - Akhir-akhir ini paradigma mengenai posisi publik sebagai “customer” menjadi perhatian berbagai instansi pemerintah. Publik/ masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik dari aparat pemerintah selaku pelayan masyarakat. Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah tersebut juga telah dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 bab 1 UU N. 25 Tahun 2009 bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk memberikan

pelayanan publik yang baik, beberapa instansi pemerintah meningkatkan fasilitas yang digunakan dalam melayani masyarakat. Pandangan terhadap posisi masyarakat berubah, tidak sekedar sebagai obyek tetapi sebagai subyek layanan. Pelayanan kepada masyarakat merupakan upaya yang tidak terpisahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Data dari beberapa survey yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat dengan ditandai oleh pelayanan publik yang tidak transparan, diskriminatif, berbelit-belit, korup dan sebagainya.

Semua kondisi ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas penyelenggara pelayanan publik yang belum mampu mengubah pandangannya tentang pelayanan publik, belum dipenuhinya standarisasi pelayanan dan rendahnya partisipasi masyarakat

Agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, maka harus ada yang memperhatikan implementasi dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 oleh instansi pemerintah, sehingga ada kontrol dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun perorangan, yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah). Oleh sebab itu, Ombudsman melaksanakan penilaian kepatuhan instansi pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Menjelang akhir tahun 2013, ombudsman melakukan penilaian terhadap 36 (tiga puluh enam) lembaga, baik Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Non Struktural.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dikatakan bahwa, asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Berdasarkan asas tersebut, maka variabel yang digunakan oleh Ombudsman untuk menilai kepatuhan adalah Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, Unit Pengaduan, Sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, Visi, Misi dan Moto, Sertifikat ISO 9000:2008, Atribut, dan Sistem Pelayanan Terpadu. Dengan demikian, nilai yang diperoleh oleh lembaga yang dinilai dibagi ke dalam 3 (tiga) zonasi kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:

1. Zona merah atau kepatuhan rendah (0 – 500) : Zona merah menggambarkan kepatuhan yang rendah dari penyelenggara perizinan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Zona kuning atau kepatuhan sedang (501 – 800) : Zona kuning menggambarkan kepatuhan yang sedang terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



Sarana pencarian arsip berbasis IT

3. Zona hijau atau kepatuhan tinggi (801 -1000) : zona hijau menggambarkan kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Bagi Lembaga yang diteliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kepatuhan lembaga dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lembaga bersangkutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan bagi Ombudsman RI, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan koordinasi antara Ombudsman RI dengan lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Hasil penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap 36 lembaga pemerintah menjelang akhir tahun 2013, menunjukkan bahwa 6 lembaga masuk dalam zona merah, 20 lembaga masuk dalam zona kuning, dan 10 lembaga masuk dalam zona hijau. Dalam penilaian tahun 2013, ada 10 lembaga yang masuk dalam zona hijau, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Konsil

Kedokteran Indonesia (KKI), BPOM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Banding Merek, Komisi Banding Paten, Badan Pusat Statistik, LAPAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. ANRI berhasil memperoleh nilai tertinggi, artinya, tingkat kepatuhan ANRI terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tinggi. Hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras ANRI guna mewujudkan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Kepuasan publik menjadi tolak ukur dalam melakukan introspeksi terhadap pelayanan yang diberikan kepada publik. ANRI telah melengkapi fasilitas yang memudahkan dan membuat nyaman publik sebagai “user” dari arsip. Mulai dari penyediaan buku inventaris manual yang lengkap, pencarian cepat arsip dengan menggunakan sistem, sampai dengan fasilitas khusus bagi ibu hamil dan “disable” person. Kejelasan informasi mengenai biaya copy arsip dan waktu yang dibutuhkan dalam pencarian arsip juga telah terpampang dalam ruang baca arsip. Kotak kritik dan saran juga telah disediakan sebagai umpan balik dari “user” arsip. Semua ini dilakukan ANRI demi memberikan yang terbaik bagi publik. Semoga. (SS)



KUNJUNGI...
GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke website www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh file "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan software Adobe Acrobat